

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR
(STUDI KASUS DI KAWASAN PERUMAHAN PONDOK GEDE PERMAI,
JATIASIH, KOTA BEKASI PERIODE 2013-2014)**

Oleh

Adinda Nurul Hikmah (14010110141002)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research to knowing the evaluation of implementation policy in flood disaster management adopted by the local government in a residential area of Pondok Gede Permai (PGP), Bekasi City, period 2013-2014. Pondok Gede Permai (PGP) as the worst locations from the disaster effect with the water depth reached \pm 5 meters in 2013 and \pm 3.5-4 meters in 2014 caused by high rainfall, damaged embankments, and run-off water. This flood disaster not just happened when a disaster occurs that repeated five years namely in 2002, 2007, and 2013 but it has happened since 1993, 1997, and 2005. Policy such as embankments repairs has been doing since Bekasi District authority until their administrative transition into Bekasi City. This raises several issues that can be studied is how the implementation policy was to do? How is the evaluation from that implementation policy? And, what the factors encountered in flood disaster management in residential area of PGP?

This research uses a mixed methodology approach to evaluation by William Dunn. The population in this research is a residential community in Pondok Gede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi. Sampling technique used is non probability sampling with purposive sampling type and the total sample is 95 respondents. The technique of collecting data through observation, structured interviews, questionnaires, and literature study. Data were analyzed using a combination of approaches, namely quantitative questionnaires with the highest score of 5 (five) and the lowest value of 1 (one) as well as qualitative data with reduction, data presentation, and draw conclusions.

The results in this research indicate that the evaluation of the implementation policy conducted by the local government of Bekasi City considered successful by the majority of people with an average value of 54% of the total respondents. Recommendations for the research is need cooperation between the government of Bekasi City, Bogor District, and the Central Government; embankments improvements made permanent and need for budget transparency and developers; local governments more empowering community organizations; extra facilities and budget for disaster management; and etc.

Keywords: evaluation, implementation, policy, flood, disaster management

I. PENDAHULUAN

Carter sebagaimana dikutip oleh Robert J Kodoatie & Roestam Sjarief (2010: 53-54) mendefinisikan bencana sebagai suatu kejadian alam atau buatan manusia, tiba-tiba atau *progressive*, yang menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bencana alam disebabkan oleh dua faktor, yakni bencana alam yang terjadi karena faktor alam dan bencana alam yang disebabkan oleh aktifitas manusia.¹ Bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam disebabkan karena Indonesia memiliki letak astronomis antara 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT yang menunjukkan bahwa Indonesia beriklim tropis. Hal tersebut menyebabkan suhu di Indonesia cukup tinggi antara 700mm – 7000mm per tahun. Olehkarenanya, tidak heran apabila disejumlah daerah akan mengalami berbagai bencana kekeringan ketika musim kemarau dan apabila memasuki musim penghujan akan mengalami bencana banjir.² Bencana banjir misalnya, bencana yang sering ditemui di kawasan perkotaan, seperti Kota Bekasi yang masuk ke dalam kawasan Jabotabek, Megapolitan, dan Penyangga Ibu Kota. Dikutip melalui nationalgeographic.co.id mengatakan bahwa sejak tahun 1996 telah terjadi fenomena banjir besar yang terulang setiap lima tahun di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, yaitu pada tahun 2002, 2007, dan 2013 yang disebabkan oleh

¹ Robert J Kodoatie & Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air* (Yogyakarta: ANDI, 2010).hal 56

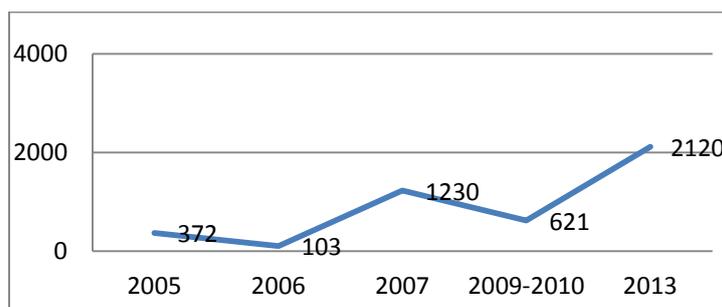
² http://ms.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia diakses pada hari Rabu, 15 Januari 2014 pukul 17.27 WIB

intensitas curah hujan yang tinggi dan terus menerus terjadi, baik di wilayah Jabotabek dan Kabupaten Bogor.³

Selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kurangnya daerah resapan air hujan (*drainase*) di kawasan perkotaan menjadikan potensi bencana cenderung meningkat. Tentu, semakin berkurangnya *drainase* ini disebabkan karena adanya arus urbanisasi sehingga lahan yang semula kosong menjadi lahan terbangun demi memenuhi kebutuhan pokok dan non pokok masyarakat karena dengan semakin meningkatnya aktifitas manusia dibutuhkan juga infrastruktur sebagai penunjangnya. Salah satunya dilihat dari pembangunan Mall baik di wilayah kota maupun kabupaten di Bekasi yang disebut sebagai daerah yang mempunyai jumlah pembangunan terbanyak jika dibandingkan dengan penyangga ibukota lainnya, yakni pada tahun 2015 dikatakan paling sedikit tujuh (7) Mall yang akan berdiri.⁴ Berbeda dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mengalami prosentase kenaikan sangat lamban, yaitu tahun 2013 hanya sebesar 14%, tahun 2012 hanya sebesar 13%, dan tahun 2011 hanya mencapai 10%. Kurangnya RTH menyebabkan perkembangan wilayah tergenang banjir di Kota Bekasi semakin luas.

Gambar 1.1

Perkembangan Luas Wilayah Tergenang Banjir 2005-2013 (Ha) Kota Bekasi



Sumber: RPJMD Kota Bekasi Periode 2013-2018 dengan keterangan tahun 2008 dan 2011 tidak terjadi banjir, diakses pada hari Selasa 9 Desember 2014 pukul 14.48 WIB (bekasikota.go.id/read/11625/rpjmd-2013—2018)

³ <http://nationalgeographic.co.id/forum/topic-1497.html> diakses pada hari Jum'at, 7 November 2014 pukul 17.06 WIB

⁴ <http://bekasiraya.com/detail.php?id=4255#.UYyH4a12lz5> dilihat pada hari Jum'at, 10 Mei 2013 pukul 12.48 WIB

Begitu juga dengan jumlah titik banjir yang tidak sedikit, yaitu mencapai 67 titik pada tahun 2007 dan 49 titik pada tahun 2013/2014. Dari sekian banyak titik banjir yang tersebar di 12 kecamatan, Kecamatan Jatiasih merupakan wilayah dengan genangan banjir paling luas di Kota Bekasi, yaitu 330 Ha dari total luas wilayah 2.200 Ha. Pada kecamatan ini juga memiliki salah satu perumahan yang terkena dampak terparah dari kejadian bencana banjir jika dibandingkan dengan kawasan lainnya di Kota Bekasi, yaitu perumahan Pondok Gede Permai (PGP). Perumahan yang berdiri sejak tahun 1989 dan terletak di bantaran Kali Bekasi tidak hanya mengalami kejadian bencana banjir besar yang berulang setiap lima tahun, yakni 2002, 2007, 2013 melainkan juga sejak tahun 1993, 1997, dan 2005 sudah mengalami musibah banjir sebagai akibat dari meluapnya Kali Bekasi.⁵ Begitu pun dengan kejadian bencana banjir yang juga terjadi di awal tahun 2014. Adapun penyebab terjadinya banjir di kawasan ini baik pada saat masih dalam wewenang Kabupaten Bekasi hingga setelah adanya peralihan administratif menjadi Kota Bekasi dijabarkan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Penyebab Banjir di PGP dari tahun 1993 sampai 2014

Tahun	Penyebab	Ketinggian Air
1	2	3
1993 dan 1997	Meluapnya air dari Kali Bekasi. Disamping itu tanggul masih sederhana terbuat dari tanah.	± 50 cm sehingga belum menimbulkan dampak yang besar.
2002, 2005, dan 2007	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas curah hujan yang terus menerus terjadi selama dua minggu di Jabodetabek pada tahun 2002 - Intensitas hujan yang tinggi terjadi di Kabupaten Bogor pada tahun 2007 - Rusaknya tanggul di RW 08 tepatnya di RT 03 	± 3 – 5 meter
2013	<ul style="list-style-type: none"> - Curah hujan yang tinggi sejak Desember 2012 di Jabodetabek⁶ - Tanggul limpas karena tidak mampu menampung air kiriman yang berasal dari Kali Cileungsi dan Kali Cikeas.⁷ Selain itu, rusaknya tanggul di dua titik (<i>overtapping</i> atau jebol)⁸ 	± 5 meter

⁵ Nita Sri Ahaliati. (2013). Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi Pasca Banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_Jakarta_2013 diakses pada hari Minggu, 3 Januari 2016 pukul 16.41 WIB

⁷ <http://sp.beritasatu.com/home/banjir-pondok-gede-permai-bekasi-telah-surut/29285> diakses pada hari Jum'at, 7 November 2014 pukul 18.19 WIB

⁸ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/02/05/mhqoml-bnpb-penyebab-banjir-pondok-gede-tanggul-cikeas-jebol> diakses pada hari Rabu, 29 Oktober 2014 pukul 21.32 WIB

2014	<ul style="list-style-type: none"> - Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Bogor.⁹ - Tanggul limpas bahkan air mencapai 30 cm di atas tanggul.¹⁰ - Selain itu, masih terdapatnya kebocoran tanggul yang sempat jebol beberapa waktu lalu sehingga masih adanya tanggul bocor/retak di beberapa titik dan telatnya petugas Sungai Bekasi untuk membuka seluruh pintu air.¹¹ 	± 3,5 – 4 meter
-------------	---	-----------------

Sumber: data diolah, 2015

Kawasan PGP yang menjadi lokasi terparah sebagai akibat dari kejadian bencana banjir besar selain disebabkan oleh curah hujan tentu juga karena lokasi perumahan ini yang berada di bantaran Kali Bekasi yang merupakan titik pertemuan antara Kali Cikeas-Cileungsi di Kabupaten Bogor. Kejadian bencana yang pada awal tahun 2013 mengalami dua kali musibah banjir, yakni bencana banjir pertama yang terjadi pada tanggal 18 Januari dan bencana banjir susulan yang terjadi pada tanggal 4 Februari. Sedangkan, pada kejadian bencana banjir besar yang terjadi di awal tahun 2014 terjadi sebanyak tiga kali mengalami musibah banjir, yakni bencana banjir yang terjadi sejak 12 Januari hingga 22 Februari.

Tentu saja pada kejadian bencana banjir besar ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit karena kawasan PGP merupakan kawasan yang padat penduduk. Sedikitnya 1.200 rumah terendam atau paling tidak ada sekitar 1.300 kepala keluarga yang menjadi korban bencana banjir tersebut.¹² Bahkan, tercatat kejadian bencana di awal tahun 2013 hingga memakan satu korban jiwa yang merupakan warga RW 09 atas nama Sarwani.¹³ Bambang selaku Sekretaris RW 08 menjelaskan bahwa korban yang meninggal tersebut lebih disebabkan karena *shock* melihat ketinggian air. Dengan semakin meningkatnya potensi bencana tersebut tentu sangat diperlukan adanya upaya untuk menanggulangnya, baik berupa peraturan perundangan maupun kebijakan.

Peraturan tentang penanggulangan bencana telah diatur, baik pada tingkat pusat hingga tingkat daerah. Pada tingkat pusat diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut

⁹ <http://news.liputan6.com/read/834365/kali-cikeas-meluap-rumah-di-pondok-gede-terendam-hingga-4-meter> diakses pada hari Minggu, 9 November 2014 pukul 20.11 WIB

¹⁰ <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/083556812/Banjir-Kali-Bekasi-Terparah-Tahun-ini> diakses pada hari Rabu, 29 Oktober 2014 pukul 22.06 WIB

¹¹ <http://news.liputan6.com/read/834471/bekasi-banjir-lagi-walikota-rahmat-effendi-minta-maaf> diakses pada hari Minggu, 9 November 2014 pukul 20.11 WIB

¹² <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/02/22/083556645/1200-Rumah-di-Jatiasih-Terendam-Banjir-3-Meter> diakses pada hari Sabtu, 9 Januari 2016 pukul 16.12 WIB

¹³ Kasi Trantib dan Linmas Kelurahan Jatirasa, 2013

mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (pasal 5) membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (pasal 10). Sedangkan, untuk pemerintah daerah membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (pasal 18). Oleh sebab itu, dibuatlah Perpres Nomor 18 Tahun 2008 tentang BNPB walaupun pada kenyataannya di Kota Bekasi baru didirikan BPBD di awal tahun 2015. Peraturan lain terkait penanggulangan bencana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sayangnya pada tingkat daerah hingga saat ini belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana di Kota Bekasi. Namun, peraturan tentang penanggulangan bencana dimuat kedalam beberapa peraturan daerah, diantaranya: (1) RPJPD Kota Bekasi periode 2005-2025 dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013; (2) RPJMD Kota Bekasi periode 2008-2013 dalam Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2008-2013; (3) RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 dalam Perda Nomor 11 Tahun 2013, dan; (4) RTRW Kota Bekasi periode 2011-2031 dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011.

Selain itu, kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi kejadian bencana banjir khususnya di kawasan PGP sebenarnya sudah dilakukan upaya untuk meminimalisir resiko bencana banjir melalui perbaikan fisik berupa tanggul sejak Kota Bekasi masih dalam wewenang Kabupaten Bekasi hingga adanya peralihan administratif menjadi Kota Bekasi. Walaupun pada akhirnya rusaknya tanggul tetap menjadi penyebab utama terjadinya bencana banjir di kawasan ini. Berdasarkan hal tersebut maka, permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan dari penanggulangan bencana banjir yang telah dilakukan pemerintah daerah di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai, Kecamatan Jatiasih periode 2013-2014?
2. Bagaimanakah evaluasi implementasi kebijakan dari penanggulangan bencana banjir tersebut?
3. Faktor-faktor apa saja yang dihadapi dalam menanggulangi kejadian bencana banjir tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan evaluasi dari implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam penanggulangan bencana banjir di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP) periode 2013-2014 serta untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi dalam penanggulangan bencana banjir tersebut.

Teori-teori yang digunakan dalam menganalisis data adalah teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, bencana dan penanggulangan bencana, serta banjir dan penanggulangan bencana banjir. Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Said Zainal Abidin (2012: 5) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam pembuatan proses kebijakan publik yang meliputi interaksi berbagai variabel, seperti empat faktor atau variabel kritis yang mempengaruhi berjalannya implementasi menurut George Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁴ Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan publik untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan sudah menghasilkan dampak yang diinginkan atau belum. William Dunn mengembangkan tipe kriteria evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan analisis, yaitu: efektifitas dan efisiensi, *adequacy*/ketepatan, *equity*/pemerataan, *responsiveness*, dan *appropriateness*/ketepatangunaan.¹⁵

Bencana merupakan suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam sehingga menimbulkan dampak, baik kerugian dari segi materil ataupun non-materil. Pengelolaan bencana merupakan suatu proses yang tidak hanya bersikap reaktif tetapi juga antisipatif. Oleh karenanya, pengelolaan bencana dimulai dari pra bencana, saat bencana, dan paska bencana. BNPB mendefinisikan banjir yaitu peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daerahan karena volume

¹⁴ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran Edward* (Yogyakarta: Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003).hal 1-14

¹⁵ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).hal 608-610

air meningkat.¹⁶ Penanggulangan bencana banjir dilakukan secara bertahap, yaitu: pencegahan sebelum banjir (*prevention*), penanganan saat banjir (*response/intervention*), dan pemulihan setelah banjir (*recovery*).¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *mixed methodology* sebagai upaya mengombinasikan tipe penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan evaluasi menurut Wiliam Dunn. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi. Populasi dari penelitian ini ialah masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan Pondok Gede Permai dengan menggunakan sampel sebagai perwakilan dari jumlah populasi tersebut. Peneliti menggunakan teknik sampel tidak acak atau *non probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama kepada anggota populasi. Oleh karenanya, jenis sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* yang menentukan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menentukan jumlah sampel yang diambil, peneliti menggunakan rumus dari Frank Lynch, dengan hasil:

Tabel 1.2
Jumlah Sampel Penelitian

Lokasi	Jumlah Warga	Jumlah Sampel per RW
RW 08	1.622	33
RW 09	1.573	32
RW 10	1.468	30
Jumlah Populasi	4.663	95

Sumber: data diolah, 2014

Selain penyebaran kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara kepada SKPD atau *stakeholder* terkait penanggulangan bencana banjir. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan diantaranya: (1) unsur pemerintah (*decision/policy makers*), yaitu Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi, Taruna Siaga

¹⁶ <http://www.bnppb.go.id/page/read/5/definisi-dan-jenis-bencana> dilihat pada 26 Mei 2013 pukul 21.44 WIB

¹⁷ Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi. Dalam http://bappenas.go.id/files/5913/4986/1931/2kebijakan-penanggulangan-banjir-di-indonesia_20081123002641_1.pdf. Diunduh pada hari Jum'at, 7 November 2014 pukul 18.44 WIB

Bencana, Kecamatan Jatiasih, dan Kelurahan Jatirasa; (2) kaum profesional (*intermediaries*), yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Satuan Pemuda Lingkaran Demokrasi (LSM Sapulidi), Akademisi dari Universitas Islam 45 Bekasi (Unisma 45 Bekasi); (3) masyarakat umum (*beneficiaries*) dari tokoh masyarakat di kawasan perumahan Pondok Gede Permai.

II. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir periode 2013-2014 yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi, evaluasi dari implementasi kebijakan tersebut, dan faktor-faktor apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi kejadian bencana yang terjadi. Untuk membahas mengenai implementasi kebijakan, peneliti menggunakan indikator dari Edward III dan evaluasi menggunakan kriteria menurut William Dunn. Sebelumnya, akan dipaparkan terlebih mengenai identitas responden dan kebijakan apa saja yang dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana banjir yang terjadi di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP) periode 2013-2014.

2.1 Identitas Responden

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi. Pemilihan responden ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Adapun identitas responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, lama tinggal, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Dijabarkan ke dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Identitas Responden

Jenis Kelamin	Laki-laki		Perempuan		Total	
		38		57		95 responden
Usia	Kategori Tahun					Total
	18-29	30-39	40-49	50-59	60-67	
	9	15	43	26	2	95 responden
Lama Tinggal	Kategori Tahun				Total	
	5-9	10-14	15-19	20-25		
	11	14	31	39	95 responden	

Pendidikan Terakhir	Ketegori				Total
	SD	SMP	SMA	PT	
	4	25	57	9	95 responden
Pekerjaan	Kategori				Total
	Wirausaha	Swasta	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	
	13	26	39	17	95 responden

Sumber: data diolah, 2016

2.2 Kebijakan yang dilakukan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP)

Kebijakan atau upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana banjir di kawasan PGP sebenarnya telah dilakukan sejak masih dalam wewenang Kabupaten Bekasi maupun setelah adanya peralihan administratif menjadi Kota Bekasi yakni berupa perbaikan fisik/tanggul. Berikut dijabarkan ke dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Kebijakan atau Upaya Perbaikan Tanggul di kawasan PGP

Sejak dalam Wewenang Kabupaten Bekasi hingga Peralihan Administratif

NO	Periode	Jenis Kegiatan
1	2	3
1	Masih dalam Wewenang Kabupaten Bekasi	Tanggul masih sederhana terbuat dari pasir dan tanah
2	Setelah adanya peralihan administratif menjadi Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai memperbaiki tanggul karena maraknya pembangunan disepanjang Kali Bekasi • Setelah bencana banjir tahun 2002, pemerintah mulai dengan pemasangan batu dan beton disepanjang Kali kawasan Perumahan Pondok Gede Permai • Tahun 2005, pemerintah membangun tanggul secara permanen sepanjang aliran Kali Bekasi • Tahun 2007 terjadi banjir yang menyebabkan tanggul rusak dan dilakukan perbaikan seperti semula.

Sumber : Ahaliati (2013)¹⁸

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa setelah terjadinya bencana banjir di tahun 2007, perbaikan tanggul kembali dilakukan seperti semula. Sayangnya, tanggul kembali rusak pada tahun 2013 hingga menenggelamkan kawasan tersebut hingga

¹⁸ Nita Sri Ahaliati. (2013). Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi Pasca Banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor

kedalam air mencapai 5 meter begitupun banjir kembali terjadi di tahun 2014 yang menenggelamkan hingga kedalaman air mencapai 3,5-4 meter. Nurul Furqon selaku Kabid Tata Air, Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, menjelaskan bahwa kewenangan Kali Bekasi yang menjadi sumber terjadinya bencana banjir di kawasan PGP tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kota Bekasi melainkan terdapat kewenangan yang lebih tinggi, yaitu Balai Besar Ciliwung Cisadane (BBWS) dan pihaknya lah yang mengkomunikasikan ke BBWS tersebut sebagai satuan kerja yang membidangi Pekerjaan Umum pada tingkat daerah. Kebijakan penanggulangan bencana banjir di kawasan PGP berupa perbaikan fisik tanggul yang biasanya dilakukan pada pra bencana dan kewenangannya dipegang langsung oleh pemerintah pusat, menurut Tengku Imam Kobul selaku Direktur Sosial dan Pendidikan di Lembaga Swadaya Masyarakat Satuan Pemuda Lingkar Demokrasi (LSM Sapulidi) merupakan salah satu yang menjadi kendala penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi pemerintah Kota Bekasi di kawasan tersebut. Olehkarena itu, beliau menilai bahwa kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi hanya sebatas ada banjir saja. Lebih jelas beliau mengatakan:¹⁹

“...misalkan mau membuat sempadan sungai saja, mau beton disitu misalkan, dia harus izin ke pusat. Dan walaupun tanggul itu dia bikin, nggak mampu. Anggarannya kan besar sekali tanggul itu. Sehingga kebijakannya hanya sebatas ada banjir saja. Kalau saya lihat disana ada banjir saja. Misalkan, kalau sekarang ini nggak banjir nih, nggak ada kebijakan apa-apa, nggak ada sosialisasi apa-apa... Mungkin segitu. Jadi, yang darurat saja gitu karena memang terkendala di status sungainya”.

Berikut kebijakan atau upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi bencana banjir di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai pada kejadian bencana di awal tahun 2013-2014 berdasarkan siklus pengelolaan bencana diantaranya:

¹⁹ Wawancara yang dilakukan Peneliti pada hari Rabu, 25 Februari 2015

Tabel 2.3
Kebijakan/Upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam Menanggulangi Kejadian
Bencana Banjir berdasarkan Siklus Pengelolaan Bencana di PGP
Tahun 2013-2014

Tahun Kejadian Bencana Banjir	Tahapan Penanggulangan Bencana Banjir		Kebijakan/Upaya yang dilakukan
1	2		3
2013	Pencegahan Banjir (<i>Prevention</i>)	Sebelum kejadian bencana banjir 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Paska banjir di tahun 2007 dilakukan perbaikan tanggul seperti semula
	Penanganan Saat Banjir (<i>response / intervention</i>)	Saat kejadian bencana banjir 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan informasi prakiraan banjir • Evakuasi korban • Menggelar <i>management selter</i> • Menetapkan siaga bencana selama 3 bulan terhitung sejak 17 Januari hingga 17 April.
	Pemulihan Setelah Banjir (<i>recovery</i>)	Setelah kejadian bencana banjir 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bantuan logistik • Memperbaiki tanggul sementara dengan sistem brojong yang terbuat dari kawat dan batu • Bersih-bersih rumah, lumpur, dan sampah • Menginventarisir penyebab banjir untuk kemudian memprogramkan penanganan permanen di anggaran tahun berikutnya atau anggaran perubahan.
2014	Pencegahan Banjir (<i>Prevention</i>)	Sebelum kejadian bencana banjir 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan kembali tanggul yang jebol
	Penanganan Saat Banjir (<i>response / intervention</i>)	Saat kejadian bencana banjir 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan informasi prakiraan banjir. • Evakuasi korban • Menggelar <i>management selter</i> • Perlawanan terhadap banjir dengan ditetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) terhitung mulai tanggal 20 Januari – 12 Februari 2014 di wilayah Kota Bekasi.
	Pemulihan Setelah Banjir (<i>recovery</i>)	Setelah kejadian bencana banjir 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bantuan logistik • Bersih-bersih rumah, lumpur, dan sampah • Sesuai dengan hasil Musrenbang 2014 tidak ada perbaikan tanggul. Namun, terdapat perbaikan tanggul berupa peninggian ± 30 cm dari tinggi tanggul yang semula ± 3 meter.²⁰ • Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) pada bulan Mei di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai.

Sumber: data diolah, 2015

²⁰ Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Informan dari Suroyo selaku Ketua RW 08 dan Bambang selaku Sekretaris RW 08 sekaligus Ketua KSB di Perumahan Pondok Gede Permai pada hari Rabu, 21 Januari 2015

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimanakah implementasi dari kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini ialah Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi kejadian bencana di kawasan PGP khususnya untuk kejadian bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2013 dan 2014 berdasarkan empat variabel atau faktor kritis implementasi menurut Edward III.

2.3 Implementasi Kebijakan yang dilakukan

Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam implementasi, Edward III mempertimbangkan empat faktor atau variabel kritis yang sangat menentukan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.²¹

2.3.1 Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu transmisi (penyaluran komunikasi), kejelasan, dan konsistensi.

1. Transmisi (Penyaluran Komunikasi)

Penyaluran komunikasi kebencanaan yang dilakukan sebelum adanya BPBD di komandoi oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 yang dilakukan secara berjenjang. Selain itu, penyaluran komunikasi perihal pengajuan permohonan bantuan kebencanaan juga dilakukan secara berjenjang dan harus sesuai dengan prosedur, dimulai dari aparat paling bawah untuk melaporkan kepada Dinas Sosial untuk kemudian baru ditangani. Namun ketika dalam keadaan darurat, prosedur tersebut dapat menyusul, contohnya pada kejadian bencana yang terjadi di kawasan PGP. Kejadian bencana banjir di kawasan PGP yang masuk ke dalam status nasional bahkan mendapat akses langsung ke walikota, seperti yang diungkapkan oleh Eko Santoso selaku Ketua RT 02/09 dan juga merupakan penanggungjawab Kompi 887/P2C, bahwa:²²

“Bahkan kita pun Pak Walikota begitu jam berapa pun ada ketinggian air telepon saya, dapet nomor khusus Pak Wali”.

²¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008).hal 149

²² Wawancara yang dilakukan Peneliti pada hari Sabtu, 7 Juni 2015

Penyaluran komunikasi juga tidak hanya dilakukan oleh SPKD dan *stakeholder* terkait melainkan dilakukan pula oleh organisasi masyarakat yang sudah ada di kawasan PGP, yakni Kompi 887 atau P2C yang poskonya berada di RT 02/09. Penyaluran komunikasi tersebut dilakukan secara berjenjang, yakni dimulai dari Kompi 887 yang mendapatkan informasi dari Hulu, baik Cikeas ataupun Cileungsi mengenai status ketinggian air untuk kemudian dikoordinasikan ke Bendung Kali Bekasi dan masyarakat setempat dimulai dari pengurus RW, pengurus RT, barulah kemudian ke masyarakat umum melalui *handytalkie* (HT), *handphone* (HP), bahkan TOA Masjid. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kewaspadaan kepada masyarakat apabila memang ketinggian air mencapai status darurat untuk dilakukan pengungsian 3-4 jam sebelum air datang ke lokasi ini.

Walaupun sudah terdapatnya Satlak PB sebagai pengganti karena belum memiliki lembaga yang secara khusus menangani tentang kebencanaan di Kota Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetap menyulitkan di dalam menanggulangi kejadian bencana karena sebetulnya BPBD lah yang memiliki kekuatan, seperti menyulitkan pemerintah apabila ingin menetapkan status seperti tanggap darurat karena penetapan status tersebut terlebih dahulu harus melalui rapat koordinasi dengan segala unsur yang ada di dalam Satlak PB. Engkus Kustara selaku Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bekasi periode 2006-2014 bahwa:²³

“misalnya kejadian untuk menentukan status diperlukan rapat koordinasi. Nah itu yang bikin lambat. Apa bedanya adanya BPBD? Kalo ada BPBD begitu terjadi bencana, kepala BPBD mengkaji, mendata jumlah kk sekian, jumlah itu sekian, langsung nyatakan ke walikota, oleh walikota ditetapkan. Nggak usah pake rapat lagi”.

Melalui kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan PGP mengenai hasil penilaian terhadap seberapa besar tingkat penting keberadaan BPBD di Kota Bekasi khususnya pada kejadian bencana banjir yang telah terjadi di awal tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di kawasan PGP menganggap **penting** adanya BPBD di Kota Bekasi terlebih lagi pada saat terjadinya bencana banjir di kawasan tersebut yakni dengan jumlah sebanyak 74 responden atau sebesar 78% dari

²³ Wawancara yang dilakukan Peneliti pada hari Selasa, 23 September 2014

keseluruhan responden. Sedangkan, 21 responden atau sebesar 22% lainnya menganggap **sangat penting**. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya BPBD, maka penanganan bencana bisa lebih tertangani. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden, Ilman F warga RW 08, mengatakan bahwa:

“supaya lebih cepat atau tanggap kalau terjadi bencana dan mengurangi resiko bencana”

2. Kejelasan terkait Peraturan

Kejelasan tentang hukum atau peraturan juga penting agar tidak menjadi rintangan dalam implementasi karena apabila tidak adanya kejelasan peraturan akan menimbulkan kesalahpahaman bagi implementor mengenai apa yang harus mereka lakukan. Walaupun pada kenyataannya di Indonesia, masih terbatas adanya peraturan perundangan terkait penanggulangan bencana di daerah.

Dikutip melalui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Direktorat Pengairan dan Irigasi dalam Kebijakan Penanggulangan Banjir Indonesia menjelaskan bahwa dalam hal ketersediaan landasan hukum, hampir semua pemerintah daerah belum mempunyai peraturan yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan banjir dan hanya sebatas memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang sungai dan tata ruang sehingga dalam melakukan kebijakan, pemerintah daerah menggunakan kepada pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi.²⁴ Sama halnya dengan Kota Bekasi yang hingga kini peraturan tentang penanggulangan bencana masih berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh pusat dan provinsi serta diatur ke dalam beberapa peraturan daerah lainnya, seperti RPJPD Kota Bekasi, RPJMD Kota Bekasi, RTRW Kota Bekasi, dan tupoksi SKPD terkait.

Sementara, melalui kuesioner yang disebar kepada 95 responden menunjukkan bahwa tingkat penting adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana di Kota Bekasi dalam rangka memberikan kepastian atau kejelasan agar tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) menunjukkan bahwa

²⁴ Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi. Dalam http://bappenas.go.id/files/5913/4986/1931/2kebijakan-penanggulangan-banjir-di-indonesia_20081123002641_1.pdf. Diunduh pada hari Jum'at, 7 November 2014 pukul 18.44 WIB

mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai **penting** dengan sebanyak 81 responden atau sebesar 85% dari jumlah keseluruhan responden.

3. Tingkat Konsistensi Pemerintah Kota Bekasi

Selain penyaluran komunikasi dan kejelasan terkait peraturan, konsistensi juga merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi. Konsistensi diukur terhadap perintah yang diberikan, apabila perintah tersebut tidak secara konsisten dilakukan, maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.²⁵ Olehkarenanya, tingkat konsistensi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan dan juga tingkat konsistensi pemerintah dapat dirasakan dan dinilai oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, melalui kuesioner yang disebar kepada 95 responden terkait sejauh mana tingkat konsistensi pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir khususnya pada kejadian bencana yang terjadi di awal tahun 2013 dan 2014 dinilai **cukup baik** menurut masyarakat yakni sebanyak 69 responden atau sebesar 73% dari keseluruhan responden. Mereka berpendapat bahwa penanganan bencana banjir yang terjadi dilakukan dengan sangat baik pada saat ada momen tertentu saja, seperti pada kejadian bencana di awal tahun 2013 yang bertepatan dengan Pilgub Jawa Barat. Sedangkan, pada kejadian bencana yang kembali terjadi di awal tahun 2014 tidak dirasakan “meriah” seperti saat pada kejadian bencana banjir di tahun 2013. Selain itu, mereka juga menilai pemerintah daerah dalam menanggulangi kejadian bencana hanya sebatas memberikan komando, kurang adanya pengawasan dan pemantauan terhadap penanganan yang dilakukan khususnya pada paska bencana.

2.3.2 Sumberdaya

Terdapat beberapa indikator sumberdaya, diantaranya: staf, wewenang, dan fasilitas.²⁶ Berikut merupakan kondisi sumberdaya yang menangani tentang kebencanaan khususnya bencana banjir yang terjadi di kawasan PGP di awal tahun 2013 dan 2014 berdasarkan indikator-indikatornya.

1. Staf

Staf merupakan sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan. Ukuran staf yang tepat dan disertai dengan keahlian dibidangnya sangat penting agar implementasi

²⁵ Leo Agustino, *Opcit.* hal 151

²⁶ Leo Agustino, *Opcit.* hal 151

dapat berjalan dengan baik. Kondisi sumberdaya staf atau personil penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di Kota Bekasi yang pada saat itu belum memiliki lembaga khusus menangani tentang kebencanaan dilaksanakan oleh Satlak PB (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bekasi) dengan melibatkan SKPD dan *stakeholder* di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007.

Tidak sedikitnya SKPD dan stakeholder yang masuk ke dalam Satlak PB Kota Bekasi, namun ada beberapa SKPD yang dikatakan dapat memiliki peran penting di dalam penanggulangan bencana banjir khususnya kejadian yang terjadi di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) awal tahun 2013 dan 2014, seperti Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) yang pada tahun 2013 masih menangani persoalan bencana namun tidak pada tahun 2014. SKPD lain yaitu Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta), Dinas Sosial (Dinsos), Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta pemerintah setempat yaitu Kelurahan Jatirasa dan Kecamatan Jatiasih. Selain itu, pada paska bencana banjir tahun 2014 tepatnya pada bulan Mei dibentuk jaringan penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat di lokasi rawan bencana yang dinamakan dengan Kampung Siaga Bencana (KSB) di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP).

Staf atau personil yang menangani tentang kebencanaan khususnya dalam hal ini ialah bencana banjir yang terjadi di kawasan PGP tidak hanya berasal dari unsur pemerintah saja, melainkan adanya komunitas yang berasal dari masyarakat setempat sejak tahun 2009, yaitu Kompi 887/P2C yang merupakan singkatan dari Komunitas Perduli Informasi. Sedangkan, 887 merupakan saluran frekuensi. Sementara, penyebutan P2C merupakan kepanjangan dari Pos Pemantauan Pertemuan Kali Cileungsi – Cikeas dan Kali Bekasi. Adapun Pos Pemantauan P2C berada di atas tanggul pengaman kawasan PGP tepatnya RT 02/09 dan juga posko tersebut merupakan sumbangan dari Bank Mandiri dengan tinggi sekitar 8-10 meter, ukuran 4x4, dan dilengkapi juga dengan perangkat radio komunikasi, papan pencatatan siklus air, dan 1 buah perahu karet.²⁷

²⁷ <http://kompi887.blogspot.co.id/> diakses pada hari Kamis, 7 Januari 2016 pukul 19.34 WIB

Kejadian bencana banjir di Kota yang pada awal tahun 2013 ditetapkan status siaga bencana hingga 3 bulan dan di awal tahun 2014 ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) mendapat banyak perhatian dari banyak kalangan yang tidak hanya ditangani oleh personil terkait dari dalam Kota Bekasi melainkan pada tanggap darurat banyak pihak-pihak lain yang turut membantu, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Jawa Barat, Badan SAR Nasional (Basarnas), Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Jawa Barat, Marinir, Komando Distrik Militer (Kodim) 0507 Bekasi, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bekasi Kota, Pramuka, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Partai Politik (Parpol), dan lain sebagainya. Perhatian langsung pun datang dari Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat yang langsung mengunjungi korban banjir yang terjadi di awal tahun 2013²⁸ bahkan masyarakat menjelaskan bahwa presiden yang kala itu masih dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga merespon kejadian bencana di kawasan PGP dengan memberikan bantuan untuk seluruh warga. Masyarakat juga menjelaskan bahwa kejadian bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2013 dan bertepatan dengan adanya pesta rakyat yakni Pilkada Jabar mengakibatkan kondisi personil yang ada di lokasi lebih ramai jika dibandingkan dengan kejadian pada awal tahun 2014 yaitu dengan banyaknya tenda dari masing-masing partai dan juga stasiun televisi.

Oleh karenanya, melalui kuesioner yang disebar kepada 95 responden terkait sejauh mana tingkat kecepatan aparatur dalam merespon kejadian bencana yang terjadi di kawasan PGP pada awal tahun 2013-2014 menurut masyarakat sekitar tergolong **cepat** yakni sebanyak 69 responden atau sebesar 73% dari keseluruhan responden. Mereka menganggap bahwa respon tanggap darurat yang dilakukan memang dapat dikatakan cepat namun untuk perbaikan paska bencana dirasakan lamban.

2. Wewenang

Kaplan sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo (2008: 64) mendefinisikan wewenang adalah kekuasaan formal yang menganggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta

²⁸ <http://infopublik.id/read/40995/gubernur-jawa-barat-kunjungi-korban-banjir-pondok-gede-permai.html> diakses pada hari Kamis, 10 Desember 2015 pukul 14.48 WIB

berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Oleh karenanya, dengan adanya wewenang lebih dapat menentukan pihak mana saja yang memiliki tugas untuk melakukan sesuatu dan pihak mana yang tidak. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karena belum memiliki lembaga yang secara khusus menangani tentang kebencanaan, maka dibuatlah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Bekasi yang di dalamnya mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi SKPD/*stakeholder* mana saja yang memiliki wewenang terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Bekasi.

Setelah dapat dipastikan SKPD/*stakeholder* mana saja yang memiliki tugas terkait kebencanaan, maka kemudian dimasukkan ke dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing SKPD/*stakeholder* tersebut, seperti pada beberapa SKPD di atas yang telah disebutkan memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di kawasan PGP. Adapun secara garis besar wewenang yang ada pada masing-masing tupoksi SKPD dan *stakeholder* terkait antara lain: (1) Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi dalam kejadian bencana banjir yang terjadi di kawasan PGP, Disbimarta memiliki wewenang terkait memperbaiki tanggul jebol dengan membuat tanggul sederhana yang terbuat dari batu dan brojong pada paska bencana. Kemudian, diinventarisir untuk pengajuan penanganan permanen kepada pemerintah pusat ;(2) sebelum adanya BPBD, Dinas Sosial pada kejadian bencana khususnya bencana banjir di awal tahun 2013 hanya memiliki wewenang terkait bantuan logistik. Sementara, pada tahun 2014 Dinas Sosial tidak hanya memiliki wewenang terkait bantuan logistik saja melainkan juga wewenang evakuasi karena pada tahun tersebut Badan Kesbangpolinmas yang semula memiliki wewenang terkait evakuasi ternyata sudah tidak lagi menangani tentang kebencanaan di Kota Bekasi; (3) Taruna Siaga Bencana selaku dibawah naungan Dinas Sosial memiliki wewenang terkait *management selter*; (4) sementara, Kelurahan dan Kecamatan memiliki wewenang sebagai penyambung atau sebagai tindaklanjut terhadap dinas-dinas terkait.

3. Fasilitas

Kota Bekasi yang memiliki titik rawan banjir tidak sedikit dan disertai adanya ancaman bencana banjir besar, akan menimbulkan dampak buruk tidak hanya bagi masyarakat sekitar melainkan juga bagi pemerintah. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan

tersedianya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai, seperti peralatan evakuasi, bantuan logistik untuk korban bencana, dan anggaran penanggulangan bencana yang dialokasikan.

Slamet Haryono, Kasi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kota Bekasi yang ditemui pada Januari 2015, mengatakan bahwa untuk tahun fasilitas penanggulangan bencana banjir pada tahun 2014 di Kota Bekasi sudah mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal serupa diungkapkan oleh Agus Dharma, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi yang dikutip melalui beritasatu.com pada November 2014 bahwa Dinas Sosial Kota Bekasi telah memiliki 15 unit perahu karet yang jumlahnya bertambah dari sebelumnya yang hanya berjumlah 3 (tiga) unit. Begitu pun telah memilikinya peralatan selam sebanyak tiga unit, tandu apung, pelampung, dan lima mesin perahu berkapasitas 15 PK dan 30 PK, serta alat sirine agar dapat mempercepat mobilitas para personil tanggap bencana.²⁹ Selain itu, untuk kejadian bencana banjir di kawasan PGP yang pada awal tahun 2013 juga mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan yang tidak hanya bantuan berupa tenaga dari para relawan di luar Kota Bekasi namun juga bantuan berupa peralatan evakuasi, seperti halnya bantuan yang diberikan oleh Marinir dan Badan SAR Nasional berupa tambahan perahu karet.³⁰ Walaupun demikian, Tengku Imam Kobul selaku Direktur Sosial dan Pendidikan di LSM Sapulidi menilai bahwa sebetulnya peralatan evakuasi yang dimiliki Kota Bekasi masih belum cukup untuk mengcover kejadian bencana banjir yang ada karena titik banjir di Kota Bekasi tidaklah sedikit.

Bantuan logistik tersebut tidak hanya datang dari SKPD maupun instansi pemerintahan saja melainkan juga dari pihak swasta begitupun tidak hanya datang dari dalam Kota Bekasi saja melainkan juga terdapat bantuan yang datang dari luar Kota Bekasi. Bahkan masyarakat PGP yang ditemui mengatakan bahwa pada kejadian bencana tahun 2013 bantuan juga didapatkan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada saat itu menjabat sebagai RI 1. Sayangnya, banyaknya bantuan yang datang tersebut dikeluhkan masyarakat di kawasan PGP karena mereka menilai pendistribusian yang dilakukan tidak tepat sasaran, seperti yang dikatakan Bambang

²⁹ <http://www.beritasatu.com/megapolitan/225123-dinsos-kota-bekasi-gelar-kesiapan-personel-siaga-banjir.html> diakses pada hari Minggu, 20 Desember 2015 pukul 16.21 WIB

³⁰ <http://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/01/18/mgtqey-ratusan-korban-banjir-jati-asih-dievakuasi> diakses pada hari Kamis, 16 Desember 2015 pukul 12.52 WIB

selaku Sekretaris RW 09 sekaligus Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB) di PGP bahwa:³¹

“...orang kampung diblepotin pake lumpur buat dapet bantuan. Bantuannya sangat tidak tepat sasaran...”.

Fasilitas pendukung dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bekasi khususnya pada kawasan PGP untuk kejadian di awal 2013 dan 2014 tidak hanya dalam bentuk sarana melainkan juga prasarana penanggulangan bencana banjir, seperti digelarnya *management selter* yang dilakukan Tagana dengan mendirikan beberapa posko, seperti pos kesehatan, tenda logistik, tenda dapur umum, tenda pengungsi balita dan dewasa. bantuan prasarana pun datang dari luar Kota Bekasi dalam bentuk pendirian dapur umum di dekat lokasi perumahan yang terendam air disertai dengan adanya bantuan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan Palang Merah Remaja Kota Bekasi.³²

Sementara, kondisi fasilitas (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana banjir yang tersedia di dalam kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), seperti pada tahun 2014 sarana penanggulangan bencana banjir berupa pompa air sebanyak 5 buah yang sebelumnya pada tahun 2013 hanya berjumlah 3 buah namun pada paska banjir 2014 tepatnya bulan Desember ditambah 2 buah pompa baru di RW 08 dan RW 010.³³ Sedangkan, prasarana yang ada di kawasan PGP yakni Posko P2C/Kompi 887 yang terdapat di RT 02/09 dan juga untuk menunjang keberlangsungan KSB khususnya di kawasan PGP telah disediakan Gardu Sosial dan Lumbung Sosial yang terdapat di Kelurahan Jatiasih. Sayangnya, posko P2C/Kompi 887 merupakan prasarana yang bukan berasal dari pemerintah daerah melainkan bantuan yang diberikan pihak Swasta, yaitu Bank Mandiri melalui pengajuan proposal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Bantuan tidak hanya berupa prasarana berbentuk bangunan, melainkan diberikan juga sarana berupa peralatan penanggulangan bencana banjir. Sementara, sarana penanggulangan bencana banjir yang diberikan oleh pemerintah

³¹ Wawancara yang dilakukan Peneliti pada hari Rabu, 21 Januari 2015

³² <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/91/18mgtqey-ratusan-korban-banjir-jati-asih-dievakiasi> diakses pada hari Kamis, 16 Desember 2015 pukul 12.52 WIB

³³ Hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Suroyo selaku Ketua RW 08 Perumahan PGP pada Rabu, 21 Januari 2015

daerah melalui lumbung sosial dinilai kurang. Bambang selaku Ketua KSB di kawasan PGP mengatakan bahwa:³⁴

“Lumbung itu dikasihnya nggak maksimal, untuk kelurahan nggak maksimal. Cenderung kurang-kurang maksimal... cuma untuk mengcover satu kelurahan itu nggak mungkin”.

Selain fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana penanggulangan bencana, anggaran yang disediakan untuk penanggulangan bencana juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi khususnya dalam variabel sumberdaya. Nurul Furqon selaku Kabid Tata Air di Disbimarta yang ditemui pada Juli 2014 mengatakan bahwa anggaran penanggulangan bencana di Kota Bekasi berasal dari APBD tak terduga. Sayangnya, anggaran penanggulangan bencana tersebut menjadi salah satu faktor yang membatasi implementor dalam melakukan penanggulangan bencana karena anggaran penanggulangan bencana yang dianggarkan terbilang minim.

Dikutip melalui beritabekasi.co³⁵ menjelaskan bahwa alokasi tanggap darurat banjir pada tahun 2013 hanya berjumlah Rp 200 juta untuk seluruh kejadian bencana di Kota Bekasi. Olehkarenanya, Didit Susilo selaku Direktur Bekasi Parliamentary Center (BPC) yang juga dikutip melalui beritabekasi.co berpendapat walaupun memang musibah banjir merupakan tanggungjawab bersama namun kesediaan anggaran dalam mengantisipasi musibah banjir sama sekali tidak ada. Selain itu, beliau juga berpendapat anggaran Rp 200 juta tersebut tidak cukup untuk mengcover kebutuhan banjir yang terjadi di 99% wilayah Kota Bekasi dan meskipun pemerintah daerah memiliki hak untuk mengajukan pemakaian anggaran tanggap darurat bencana banjir melalui anggaran tidak terduga atau memakai dana cadangan daerah, seharusnya dana darurat tersebut secara realistis tersedia agar tidak menambah beban masyarakat yang menjadi korban. Sedangkan pada bencana banjir pada tahun 2014, anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana mengalami penambahan. Dikutip melalui viva.co.id³⁶ menjelaskan bahwa dana yang disediakan pemerintah daerah selama status KLB sebesar

³⁴ Wawancara yang dilakukan Peneliti pada hari Rabu, 21 Januari 2015

³⁵ www.beritabekasi.co/proses.php?id=1842 diakses pada hari Rabu, 16 Desember 2015 pukul 16.41 WIB

³⁶ <http://m.news.viva.co.id/news/read/474773-indonesia-darurat-bencana-butuh-solusi-cepat> diakses pada hari Rabu, 16 Desember 2015 pukul 20.41 WIB

Rp 4 miliar. Adapaun dana tersebut digunakan untuk pencegahan dini terhadap penyakit, seperti pengadaan obat-obatan, perawatan sakit kulit, batuk, diare, pengadaan selimut, dan pendistribusian makanan ke dapur-dapur umum pengungsi.

Terkait kejadian bencana banjir di kawasan PGP yang bersumber dari rusaknya tanggul, anggaran dana yang dialokasikan untuk memperbaiki tanggul dengan tanggul sementara berasal dari dana APBD sedangkan untuk memperbaiki tanggul secara permanen berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum karena wewenang DAS Kali Bekasi merupakan aset pusat. Sayangnya, transparansi perihal anggaran perbaikan tanggul di kawasan PGP baru dilakukan melalui selebaran yang diberikan kepada masing-masing pengurus RT/RW pada tahun 2015. Selebaran tersebut berjudul, “Proyek APBD Tahun 2015 yang akan direalisasikan Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi” berisi nominal anggaran yang dialokasikan untuk proyek pembangunan, penguatan, dan peninggian tanggul DAS Kali Bekasi di kawasan PGP senilai Rp 15,4 miliar.

Sementara untuk tahun 2013, dikutip melalui antaranews.com³⁷ menjelaskan bahwa proyek perbaikan tanggul Kali Bekasi yang jebol sepanjang 200 meter sebagai akibat dari kejadian bencana di awal tahun 2013 telah dilakukan pada Oktober 2013 hingga menelan biaya mencapai Rp 39 miliar. Proyek tersebut dilakukan oleh pusat dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum di empat titik lokasi tanggul, yaitu dua titik di Perumahan Kemang Ifi dengan tanggul jebol dan terkikis erosi mencapai panjang 100 meter, Perumahan PGP dengan tanggul jebol karena terkikis erosi sepanjang 45 meter, dan Perumahan Pekayon Asri yang rusaknya mencapai 60 meter.

Selain itu, dikutip melalui beritasatu.com³⁸ menjelaskan bahwa proyek lanjutan perbaikan tanggul Kali Bekasi yang dilakukan pada Juni 2014 Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan dana senilai Rp 25 miliar dan telah dikerjakan pada bulan Juni. Tri Adiyanto selaku Kepala Disbimarta yang juga dikutip melalui beritasatu.com mengatakan perbaikan tahap awal dilakukan hanya meliputi kerusakan tanggul di PGP dengan melakukan sistem bor-pail agar pondasi tanggul lebih kokoh. Selain itu, dilakukan juga peninggian tanggul guna menghalau limpasan air saat terjadi

³⁷ <http://www.antaranews.com/berita/403758/perbaikan-tanggul-kali-bekasi-habiskan-rp39-miliar> diakses pada hari Senin, 21 Maret 2016 pukul 16.44 WIB

³⁸ <http://www.beritasatu.com/megapolitan/190903-pu-alokasikan-rp-25-m-untuk-proyek-lanjutan-tanggul-kali-bekasi.html> diakses pada hari Senin, 21 Maret 2016 pukul 17.04 WIB

peningkatan debit dan untuk tahap berikutnya dilaksanakan di Perumahan Depnaker dan Pondok Mitra Lestari.

Sebetulnya, kurangnya transparansi yang dilakukan pemerintah khususnya tahun 2013 dan 2014 disayangkan oleh tokoh masyarakat yang ditemui. Bambang selaku Sekteratis RW 09 sekaligus sebagai Ketua KSB PGP mengatakan bahwa:³⁹

“kita nggak tahu berapa alokasi dananya. Tapi, secara keseluruhan pada saat pra bencana sampe ke paska bencana kita nggak tahu alokasi dananya berapa. Kalau misalnya ngomong di koran, kan saya nggak baca koran. Dateng dong kesini, kan kita aparatur kecil... ini tanggul untuk menghadapi bencana tahun 2015 sekian milyar, itu kita baru tahu”.

2.3.3 Disposisi

Terdapat beberapa indikator di dalamnya, yaitu pengangkatan personil dan insentif. Berikut merupakan kondisi dari sikap para implementor dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir yang terjadi di kawasan PGP pada awal tahun 2013 dan 2014.

1. Pengangkatan Personil

Pemilihan dan pengangkatan personil sangat dibutuhkan agar di dalam melaksanakan suatu kebijakan, para pelaksana tersebut memiliki dedikasi yang tidak hanya kepada kebijakan melainkan juga kepada kepentingan masyarakat. Dalam penanggulangan bencana di Kota Bekasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa belum memilikinya lembaga yang secara khusus menangani tentang kebencanaan pada saat itu dibentuklah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) yang personilnya terdiri dari SKPD dan *stakeholder* yang ada di Kota Bekasi. Begitu pun dengan Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Dinas Sosial, dan Tagana yang juga memiliki pemilihan dan pengangkatan personil berdasarkan masing-masing kriteria yang dimiliki khususnya dalam hal ini ialah personil yang menangani tentang penanggulangan bencana banjir.

Priadi Santoso selaku Ketua Bidang Kepegawaian di Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi mengatakan bahwa secara umum Disbimarta tidak memiliki wewenang terhadap pembukaan rekrutmen pegawai baru karena yang memiliki wewenang tersebut

³⁹ Wawancara yang dilakukan Peneliti pada hari Rabu, 21 Januari 2015

langsung dari pusat atau dalam hal ini adalah tingkat kota melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi. Beliau menjelaskan lebih lanjut, pihaknya apabila memang dibutuhkan pegawai baru, maka akan mengajukan usulan kepada BKD sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan posisi rekrutmen yang dibutuhkan. Sementara, untuk penanggulangan bencana banjir beliau menjelaskan bahwa biasanya pihaknya akan membuat tim khusus yang tidak hanya dibebankan kepada bidang Tata Air melainkan bidang-bidang yang ada pada Dinas Bina Marga dan Tata Air juga turut dilibatkan.

Sementara, Slamet Haryono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Bekasi menjelaskan bahwa untuk pengangkatan personil khususnya pada Seksi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang memiliki wewenang terkait penanggulangan bencana dalam hal ini ialah melakukan pembinaan terhadap Tagana Kota Bekasi, sama-sama terlebih dahulu mengusulkan hal tersebut kepada BKD Kota Bekasi. Beliau mengatakan apabila membutuhkan pegawai baru dengan usulan minimal calon tersebut memiliki pengetahuan tentang bencana, pernah mengikuti pelatihan, lebih bagus lagi apabila calon tersebut pernah mengikuti pelatihan Badan SAR Nasional. Namun, beliau meyakini selama ini pegawai yang didapatkan belum memenuhi kriteria sementara personil yang sudah dianggap telah memiliki dedikasi terhadap bencana malah dipindahkan ke dinas lain.

Disisi lain, Engkus Kustara selaku Ketua Tagana Kota Bekasi periode 2006-2014 terkait pemilihan dan pengangkatan personil mengatakan bahwa sulitnya menggerakkan masyarakat di perkotaan untuk masalah kebencanaan, maka dilibatkan lah orang-orang calon PNS sebagai Tagana (relawan) yang pada tahun 2006 berdiri di Kota Bekasi dengan diberikan pembinaan oleh provinsi di Bandung sebanyak \pm 8 orang dari Kota Bekasi dan kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjadi anggota Tagana, Engkus Kustara mengatakan paling tidak mereka diambil dari lokasi rawan bencana, memiliki kemampuan dan kemauan, dan pendidikan (baca dan tulis). Sebetulnya, Engkus Kustara menyangkan perekrutan Tagana yang tidak tepat sasaran karena anggotanya diambil bukan berasal dari lokasi rawan bencana. Olehkarenanya, dibentuklah Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kota Bekasi setelah diberikan pelatihan selama tiga hari dan mempunyai keanggotaan sebanyak 50 orang terdiri dari masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM), Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan Tagana yang diposisikan sebagai pendamping.

2. Insentif

Insentif dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi yang menurut Edward III dengan adanya insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri-sendiri. Olehkarenanya, dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu memungkinkan menjadi salah satu faktor pendorong agar para implementor dapat bekerja dengan baik.⁴⁰

Slamet Haryono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (PDBS) di Dinsos Kota Bekasi mengatakan bahwa sebenarnya insentif khusus penanggulangan bencana belum ada hanya ada biaya rutin dari APBD berupa tunda dan gaji. Hal serupa juga diungkapkan oleh Priadi Santoso selaku Kepala Bidang Kepegawaian di Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Kota Bekasi. Sedangkan, Engkus Kustara selaku Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bekasi periode 2006-2014 mengatakan bahwa adanya insentif yang diberikan langsung dari Kementerian Sosial RI kepada Tagana Kota Bekasi per tiga bulan sejumlah Rp 100.000/orang. Namun, untuk Kampung Siaga Bencana (KSB) belum ada. Lebih jelas beliau mengatakan:⁴¹

“...untuk KSB sampai saat ini belum teranggarkan... ada dari Kementerian Sosial RI untuk Tagana perorang Rp 100.000 tapi kalau misalnya ada kegiatan lain ada dapat honor... misalnya, sekarang ada banjir yaa kita turunkan anggota dibuatkan laporannya ke Dinas Sosial Provinsi diajukan berapa hari bikin daftar absennya. Itu dapat bantuan dari sana, misal Rp 50.000 x jumlah orangnya... perbulan Tagana tidak ada, itu yang Rp 100.000,- diberikan 3 bulan sekali”.

Selain itu, pemerintah setempat juga mengatakan tidak adanya insentif yang diberikan untuk penanggulangan bencana baik tingkat kecamatan maupun kelurahan. Begitu pun dengan organisasi masyarakat, Kompi 887, yang memiliki peran penting sebagai pemantau tinggi air dan pembaca arus tidak diberikan gaji atau insentif oleh pemerintah daerah.

⁴⁰ Leo Agustino, *Opcit*. hal 153

⁴¹ Wawancara yang dilakukan Peneliti pada hari Selasa, 23 September 2014

Melalui kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan PGP terkait setuju atau tidak dengan adanya insentif khusus untuk penanggulangan bencana di Kota Bekasi yang dimungkinkan menjadi salah satu faktor pendorong para personil untuk dapat melaksanakan perintah lebih baik mayoritas masyarakat menilai **setuju**, yakni sebanyak 73 responden atau sebesar 77% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti masyarakat di kawasan PGP berpendapat bahwa dengan adanya insentif khusus untuk penanggulangan bencana merupakan salah satu faktor pendorong para personil dalam melakukan tugas khususnya terkait penanggulangan bencana menjadi lebih baik.

2.3.4 Struktur Birokrasi

Selain, komunikasi, sumberdaya, dan disposisi, terdapat variabel atau faktor kritis terakhir yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, yaitu struktur birokrasi karena untuk terselenggaranya sebuah kebijakan dibutuhkan kerjasama banyak pihak dengan melakukan koordinasi dengan baik. Terdapat dua indikator menurut Edward III yang dapat memengaruhi kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu *Standar Operating Procedures (SOPs)* dan *Fragmentasi*.⁴² Berikut merupakan kondisi organisasi penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di Kota Bekasi berdasarkan indikator tersebut.

1. SOP (*Standar Operating Procedures*)

SOPs merupakan kegiatan rutin yang memungkinkan para personil penanggulangan bencana di Kota Bekasi dalam melaksanakan kegiatannya memiliki standar yang telah ditetapkan. Selain untuk pedoman bagi implementor di dalam melaksanakan kegiatan, SOPs dapat juga menghemat waktu karena sudah tersedianya petunjuk yang ditulis sehingga dapat mengantisipasi apabila situasi khusus terjadi.⁴³ Namun sayangnya, di lapangan peneliti menemukan fakta bahwa di Kota Bekasi baru memiliki SOPs tentang penanggulangan bencana pada awal tahun 2015. Pada kejadian bencana yang terjadi pada awal tahun 2013 dan 2014, disamping belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus tentang penanggulangan bencana hingga kini begitupun juga belum memilikinya SOPs tentang penanggulangan bencana di Kota Bekasi, maka penanganan kebencanaan di Kota Bekasi hanya berpedoman pada peraturan kebencanaan yang berasal dari tingkat pusat dan provinsi.

⁴² Leo Agustino, *Opcit.* Hal 153

⁴³ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Opcit.* hal 128

Oleh karenanya, tidak sedikit pihak yang berpendapat, baik dari unsur pemerintah, kaum profesional, maupun tokoh masyarakat yang ditemui sebagai informan mengatakan bahwa keberadaan SOPs tentang kebencanaan di Kota Bekasi sebetulnya penting adanya agar dapat memberikan kejelasan kepada para personil penanggulangan bencana di dalam melaksanakan tugas karena dengan adanya SOPs tersebut menjadikan penanganan kebencanaan di Kota Bekasi memiliki pedoman atau acuan yang jelas. Hal ini diungkapkan dari beberapa informan yang ditemui, seperti Slamet Haryono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai perwakilan informan dari unsur pemerintah, bahwa:⁴⁴

“penting... bisa jadi acuan, langkah saya sebagai apa dan harus bagaimana biar jelas, ada dasar”.

Melalui kuesioner yang disebar kepada 95 responden terkait sejauh mana tingkat penting adanya SOPs tentang penanggulangan bencana di Kota Bekasi agar personil di dalam melaksanakan tugas kebencanaan dapat lebih mudah karena telah memiliki standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan) mayoritas masyarakat menilai **penting** yakni sebanyak 82 responden atau sebesar 86% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti masyarakat menganggap keberadaan SOPs tersebut penting dalam rangka memberikan kemudahan kepada implementor di dalam melaksanakan tugas karena telah memiliki standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan). Selain itu mereka juga berpendapat bahwa SOPs dibutuhkan, karena dengan tidak adanya SOPs akan menyebabkan tumpang tindih dalam melakukan penanggulangan bencana dan dengan adanya SOPs akan memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas kebencanaan.

⁴⁴ Wawancara yang dilakukan Peneliti pada hari Senin, 12 Januari 2015

2. Fragmentasi

Edward III mengatakan bahwa fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggungjawab yang didistribusikan diantara unit birokrasi.⁴⁵ Dalam penanggulangan bencana di Kota Bekasi yang saat itu belum memiliki lembaga khusus tentang kebencanaan, Pemerintah Kota Bekasi menyebarkan tanggungjawab dengan membentuk lembaga non struktural yang dijadikan sebagai lembaga pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah dalam penanggulangan bencana. Lembaga tersebut disebut dengan Satlak PB (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana) yang terdiri dari unsur pembina, pimpinan, pembantu pimpinan, serta pelaksana yang ditanggungjawabkan kepada Koordinator Lapangan (Korbanlap), Unit OPB Kecamatan, dan Pokja PB Kelurahan.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Bekasi, dan Dinas Binamarga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi, dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi salah satu Koordinator Lapangan (Korbanlap) dalam Satlak PB Kota Bekasi yang memiliki peranan penting kaitannya dalam kejadian bencana banjir khususnya yang terjadi di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) di awal tahun 2013 dan 2014. Koordinator Lapangan (Korbanlap) tersebut membagi tanggungjawab ke dalam beberapa unit kerja yang ada, seperti:

- a. Badan Kesbangpolinmas merupakan salah satu SKPD terkait yang menangani persoalan kebencanaan yang terbagi ke dalam beberapa bidang, diantaranya: bidang Kesatuan Bangsa, bidang Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Politik Dalam Negeri. Kaitannya dalam penanggulangan bencana, bidang yang bertanggungjawab yaitu bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat khususnya pada Sub Bidang Perlindungan Masyarakat. Meski pada tahun 2014, Badan Kesbangpol sudah tidak menangani persoalan kebencanaan di Kota Bekasi.
- b. Dinas Binamarga merupakan dinas yang berada dalam naungan Kementerian PU yang meliputi urusan perencanaan bina marga, tata air, serta pengawasan dan pengendalian. Kaitannya dalam penanggulangan bencana banjir, unit yang

⁴⁵ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Opcit.* hal 141

- bertanggungjawab adalah bidang Tata Air meliputi pembinaan, pengembangan, pemberian rekomendasi teknik dan pengawasan prasarana bidang Tata Air.
- c. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang mengurus bidang sosial. Adapun bidang yang terdapat di Dinas Sosial meliputi: bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), bidang Pengembangan Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta bidang Pembinaan Sosial. Kaitannya dalam penanggulangan bencana khususnya dalam hal ini bencana banjir, bidang yang memiliki tanggungjawab ialah bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seksi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.
 - d. Taruna Siaga Bencana (Tagana) merupakan relawan berbasis masyarakat yang dijadikan dan dibina oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Menteri Sosial. Pada tingkat daerah, Tagana Kota Bekasi berada dalam naungan Dinas Sosial Kota Bekasi.
 - e. Kelurahan dan Kecamatan merupakan pelaksana dari unsur organisasi Satlak PB Kota Bekasi yang juga memiliki tugas dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah masing-masing. Dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di kawasan PGP, Kelurahan Jatirasa dan Kecamatan Jatiasih merupakan Unit Operasional Penanggulangan Bencana (Unit OPB) pada kawasan tersebut yang di dalam melaksanakan penanggulangan bencana tersebut bidang Keamanan dan Ketertiban (Trantib) lah yang memiliki tanggungjawab.

Agar penyebaran tanggungjawab tersebut dapat berjalan dengan baik harus juga disertai dengan adanya koordinasi, baik dari dalam SKPD maupun antar SKPD terkait. Sayangnya, koordinasi terkait penanggulangan bencana di Kota Bekasi tidak ada secara khusus pertemuan yang mengatur hal itu. Hanya ada pertemuan yang terjadi pada hari Senin yang dikumpulkannya perwakilan dari masing-masing SKPD di Kota Bekasi bertempat di Balai Patriot atau Ruang Rapat Walikota. Koordinasi yang dilakukan khusus penanggulangan bencana hanya diadakan apabila terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) melalui *briefing* yang dikoordinir oleh wakilota.

Edward III mengatakan bahwa dalam fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab tersebut memiliki konsekuensinya, yaitu membuat koordinasi yang dilakukan menjadi sulit.⁴⁶ Hal tersebut juga diungkapkan Carter dalam pidatonya pada Mei 1978 sebagaimana dikutip oleh Hessel Nogi S Tangkilisan (2003: 138) bahwa:

“Terlalu banyak dinas, yang melakukan terlalu banyak hal, yang terlalu sering rancu, yang mengkoordinasikan terlalu jarang, memboroskan terlalu banyak uang – dan melakukan terlalu sedikit untuk memecahkan masalah riil”.

Hal tersebut terbukti dari pernyataan Ariyanto Hendrata anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi yang dikutip melalui antaranews.com menilai bahwa koordinasi yang dilakukan antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) saling tumpang tindih dalam mengatasi persoalan banjir yang terjadi di awal tahun 2013, seperti pada sistem manajemen bantuan logistik korban banjir yang seharusnya dipegang oleh Dinas Sosial justru dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas).⁴⁷ Sulitnya koordinasi yang dilakukan selain karena belum memilikinya BPBD di Kota Bekasi pada saat itu, juga dikarenakan belum adanya SOPs tentang penanggulangan bencana. Hal ini dikemukakan oleh Slamet Haryono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Bekasi bahwa:

“... Kendala tidak adanya SOPs berarti kan pelaksanaan koordinasi di bawah tidak jelas, bikin mau sendiri”.

Tidak hanya dari unsur pemerintah yang meng-iya-kan koordinasi yang terjadi sulit dilakukan dengan baik khususnya dalam menanggulangi kejadian bencana banjir di kawasan PGP yang pada saat itu belum memiliki peraturan khusus tentang penanggulangan bencana, tidak adanya lembaga yang secara khusus mengatur tentang kebencanaan, dan juga SOPs tentang penanggulangan. Masyarakat pun memiliki pendapat yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Bambang selaku Sekretaris RW 08 sekaligus Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB) di kawasan PGP. Lebih jelas beliau mengatakan:⁴⁸

⁴⁶ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Opcit.* hal 141

⁴⁷ <http://www.antaranews.com/berita/354293/pemkot-bekasi-dinilai-tidak-siap-hadapi-banjir> diakses pada hari Jum'at, 6 Novemver 2015 pukul 14.42 WIB

⁴⁸ Wawancara yang dilakukan Peneliti pada hari Rabu, 21 Januari 2015

“Komandonya kita bingung karena belum ada BPBD, tidak ada satu komando antara Camat, Lurah, jalan masing-masing. Kan SOPnya nggak jelas. Kalau ada, yang tanggungjawab logistik ini ini ini”.

Sulitnya koordinasi yang dilakukan selain menyebabkan tumpang tindih dalam sistematisasi penyaluran bantuan logistik, juga mengakibatkan penyaluran bantuan logistik yang diberikan kepada korban bencana tidak tepat sasaran.

2.4 Evaluasi dari Implementasi Kebijakan yang dilakukan

Setelah dibahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir dilakukan, maka penting juga untuk mengetahui bagaimana hasil dari implementasi kebijakan tersebut. Untuk melihat hasilnya, peneliti menggunakan pendekatan evaluasi menurut William Dunn (1999) yang terbagi menjadi enam kriteria yaitu efektivitas dan efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan⁴⁹.

Pada penelitian ini dibatasi ruang lingkup waktu hanya pada kejadian bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2013 dan 2014. Hasil evaluasi ini diambil melalui beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan PGP dengan teknik sampling *Purposive Sampling* berisi seputar evaluasi dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi periode 2013-2014.

1. Efektifitas dan Efisiensi

Efektivitas yang dimaksud yaitu ditekankan kepada apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai. Sedangkan, efisiensi yang dimaksud yaitu ditekankan kepada seberapa banyak usaha yang telah dilakukan sebanding dengan dicapainya hasil yang diinginkan. Berikut akan dipaparkan berdasarkan indikator implementasi menurut Edward III:

a. Komunikasi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari komunikasi yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang terjadi di kawasan PGP pada awal tahun 2013-2014 dinilai **cukup**

⁴⁹ William N Dunn, *Opcit.* hal 610

baik yakni sebanyak 50 responden atau sebesar 53% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti berbagai usaha yang telah dilakukan dalam melaksanakan komunikasi tersebut dinilai sebanding dan cukup dengan yang diterima oleh masyarakat. Komunikasi tersebut dinilai cukup baik oleh masyarakat karena adanya informasi sebelum air tiba di kawasan PGP yakni sekitar 3-4 jam mengenai perkiraan ketinggian air, debit air, dan waktu air tiba yang dilakukan melalui pesan singkat, pemberitahuan keliling dari pengurus RT/RW, dan melalui pengeras suara musholla/masjid yang ada di kawasan tersebut.

b. Sumberdaya

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari sumberdaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang terjadi di kawasan PGP pada awal tahun 2013-2014 dinilai **cukup baik** yakni sebanyak 45 responden atau sebesar 47% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti berbagai usaha yang telah dilakukan demi tersedianya sumberdaya dinilai sebanding dan cukup dengan yang diterima oleh masyarakat. Sumberdaya tersebut dinilai cukup oleh masyarakat karena banyaknya bantuan yang datang dari luar Kota Bekasi, baik personil, peralatan evakuasi, maupun bantuan logistik.

c. Disposisi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari disposisi yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang terjadi di kawasan PGP pada awal tahun 2013-2014 dinilai **cukup baik** yakni sebanyak 52 responden atau sebesar 55% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti berbagai usaha yang dilakukan dalam pengangkatan personil tersebut dinilai sebanding dan cukup dengan yang diterima oleh masyarakat karena dengan banyaknya jumlah personil yang turun dan personil tersebut telah dirasakan cukup dapat bekerja bersama masyarakat sekitar.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari struktur birokrasi yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang terjadi di kawasan PGP pada awal tahun 2013-2014 dinilai **cukup baik** yakni sebanyak 44 responden atau sebesar 46% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti berbagai usaha yang dilakukan dalam struktur birokrasi tersebut dinilai sebanding dan cukup dengan yang diterima oleh masyarakat karena yang menangani tentang kebencanaan di Kota Bekasi tidak hanya ditangani oleh salah satu pihak saja, melainkan telah disebar kepada beberapa SKPD/lembaga yang masuk ke dalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Bekasi.

2. Adequacy/Ketepatan dalam Menjawab Masalah

Kriteria evaluasi kedua yang dipaparkan yaitu mengenai sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi kejadian bencana banjir di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) pada awal tahun 2013-2014 tepat dalam memecahkan masalah. Berikut akan dipaparkan berdasarkan indikator implementasi menurut Edward III.

a. Komunikasi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *adequacy*/ketepatan dalam memecahkan masalah dari komunikasi yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang terjadi di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) pada awal tahun 2013-2014 dinilai **cukup baik** yakni sebanyak 52 responden atau sebesar 55% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti komunikasi yang telah dilakukan telah dinilai cukup tepat di dalam memecahkan masalah. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya informasi 3-4 jam sebelum air datang dapat membuat masyarakat lebih waspada dalam rangka mengurangi resiko yang timbul akibat bencana dengan melakukan berbagai persiapan, seperti evakuasi terhadap sejumlah barang dan mental dari masyarakat itu sendiri.

b. Sumberdaya

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *adequacy*/ketepatan dalam memecahkan masalah dari sumberdaya yang dilakukan dinilai **cukup baik** yakni sebanyak 55 responden atau sebesar 58% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti dari sumberdaya yang tersedia dinilai telah cukup tepat dalam mengatasi masalah karena mereka beranggapan bahwa dengan banyaknya bantuan dari berbagai pihak menjadikan masyarakat lebih dimudahkan di dalam menangani kejadian bencana bencana terlebih lagi pada saat bencana/tanggap darurat.

c. Disposisi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *adequacy*/ketepatan dalam memecahkan masalah dari disposisi yang dilakukan dinilai **cukup baik** yakni sebanyak 69 responden atau sebesar 73% dari keseluruhan responden karena dengan banyaknya personil yang turun di lapangan dan dirasakan telah cukup dapat membantu masyarakat dalam menangani masalah yang muncul, seperti proses evakuasi, bantuan logistik, dan sebagainya.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *adequacy*/ketepatan dalam memecahkan masalah dari struktur birokrasi yang dilakukan dinilai **cukup baik** yakni sebanyak 49 responden atau sebesar 52% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti masyarakat menilai penyebaran tanggungjawab yang dilakukan cukup tepat dalam memecahkan masalah yang terjadi karena dengan adanya penyebaran tanggungjawab tersebut, maka penanganan kebencanaan tidak hanya dilimpahkan tanggungjawabnya kepada salah satu lembaga/SKPD saja melainkan disebar kepada beberapa *stakeholder* yang masuk ke dalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Bekasi sehingga masyarakat menilai dengan semakin banyaknya *stakeholder* yang terlibat, maka penanganan bencana akan semakin baik penanganannya.

3. *Equity*/Pemerataan

Kriteria evaluasi ketiga yang dipaparkan yaitu mengenai sejauh mana tingkat manfaat dan biaya dari implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi kejadian bencana banjir di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) pada awal tahun 2013-2014 didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Berikut akan dipaparkan berdasarkan indikator implementasi menurut Edward III.

a. **Komunikasi**

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *equity*/perataan dari komunikasi yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang terjadi di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) pada awal tahun 2013-2014 dinilai **cukup baik** yakni sebanyak 54 responden atau sebesar 57% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti komunikasi yang telah dilakukan manfaatnya telah didistribusikan cukup merata kepada masyarakat karena penyaluran komunikasi yang dilakukan 3-4jam sebelum air datang tersebut disebarkan melalui pesan singkat (sms), pengumuman langsung oleh ketua RT/RW setempat dan Kompi 887 dengan berkeliling perumahan dan pengeras suara (toa) musholla dan masjid. Sehingga, melalui cara tersebut penyaluran komunikasi yang dilakukan dirasa cukup merata manfaatnya didistribusikan kepada masyarakat.

b. **Sumberdaya**

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *equity*/perataan dari sumberdaya yang dilakukan dinilai **cukup baik** yaitu sebanyak 53 responden atau sebesar 56% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti sumberdaya yang tersedia dinilai cukup manfaatnya telah didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Sumberdaya tersebut dinilai cukup baik oleh masyarakat karena dilihat dari banyaknya personil dan bantuan yang datang, maka hal tersebut dirasakan cukup manfaatnya telah didistribusikan secara merata kepada masyarakat dalam membantu.

c. Disposisi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *equity*/perataan dari disposisi yang dilakukan dinilai **cukup baik** yakni sebanyak 57 responden atau sebesar 60% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti masyarakat menilai disposisi yang telah dilakukan manfaatnya cukup didistribusikan secara merata kepada masyarakat khususnya perihal pengangkatan personil karena dengan banyaknya personil yang turun dan membantu masyarakat, maka pengangkatan personil yang telah dilakukan sudah cukup merata manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *equity*/perataan dari struktur birokrasi yang dilakukan dinilai **cukup baik**, yakni sebanyak 44 responden atau sebesar 46% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti struktur birokrasi yang telah dilakukan manfaatnya cukup didistribusikan secara merata khususnya perihal penyebaran tanggungjawab karena dengan banyaknya lembaga/SKPD yang terlibat atau diberikan tanggungjawab dalam menanggulangi kejadian bencana, maka manfaatnya cukup terdistribusi secara merata kepada masyarakat.

4. Responsiveness

Kriteria evaluasi keempat yang dipaparkan yaitu mengenai sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi kejadian bencana banjir di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) pada awal tahun 2013-2014 dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau keinginan dari masyarakat. Berikut akan dipaparkan berdasarkan indikator implementasi menurut Edward III.

a. Komunikasi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *responsivitas* dari komunikasi yang dilakukan **cukup baik**, yaitu sebanyak 50 responden atau sebesar 53% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti, masyarakat menilai bahwa komunikasi yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi kejadian bencana banjir di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) dinilai cukup dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, dan keinginan dari masyarakat karena mereka berpendapat bahwa komunikasi tersebut terjalin sudah cukup baik antara pemerintah setempat, komunitas masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kejadian bencana banjir yang ditetapkan sebagai status darurat telah mendapat akses khusus, seperti pada saat pengajuan permohonan bantuan kebencanaan kepada Dinas Sosial yang seharusnya melalui beberapa prosedur baru kemudian ditindak lanjuti namun untuk kejadian bencana banjir di PGP hal tersebut dapat menyusul. Hal tersebut tentu dirasakan cukup dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, dan keinginan masyarakat karena pemerintah dinilai tidak terbelit-beli dalam merespon kejadian bencana.

b. Sumberdaya

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *responsivitas* dari sumberdaya yang dilakukan dinilai **cukup baik**, yaitu sebanyak 49 responden atau sebesar 52% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti sumberdaya yang telah disediakan pada saat itu dirasa masyarakat cukup dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, dan keinginan masyarakat sekitar. Mereka beranggapan bahwa dengan banyaknya bantuan yang turun dan para personil dapat berkerjasama dengan masyarakat sudah cukup dapat memuaskan masyarakat dan cukup sesuai keinginan dari masyarakat.

c. Disposisi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *responsivitas* dari disposisi yang dilakukan **cukup baik**, yaitu sebanyak 58 responden atau sebesar 61% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti disposisi

khususnya dalam pengangkatan personil yang dilakukan cukup dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, dan keinginan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa dengan banyaknya personil yang ada di lokasi bencana, maka pengangkatan personil yang telah dilakukan dirasakan cukup memuaskan kebutuhan, preferensi, atau keinginan dari masyarakat karena sudah cukup membantu masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *responsivitas* dari struktur birokrasi khususnya dalam penyebaran tanggungjawab yang dilakukan dinilai **cukup baik**, yaitu sebanyak 42 responden atau sebesar 44% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti masyarakat menilai bahwa penyebaran tanggungjawab yang dilakukan cukup memuaskan kebutuhan, preferensi, dan keinginan masyarakat karena penyebaran tanggungjawab yang diberikan kepada beberapa lembaga/SKPD tersebut telah dirasakan masyarakat cukup peduli dalam menangani kejadian bencana.

5. Appropriateness/Ketepatangunaan

Kriteria evaluasi kelima yang dipaparkan yaitu mengenai sejauh mana ketepatangunaan dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi kejadian bencana banjir di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) pada awal tahun 2013-2014 dapat memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada masyarakat. Berikut akan dipaparkan berdasarkan indikator implementasi menurut Edward III.

a. Komunikasi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *appropriateness/ketepatangunaan* dari komunikasi yang dilakukan **cukup baik**, yakni sebanyak 53 responden atau sebesar 56% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti masyarakat menilai komunikasi yang telah dilakukan cukup dapat memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada masyarakat karena dengan adanya pemeritahuan sebelum air tiba, masyarakat dapat melakukan sejumlah persiapan, baik mental ataupun melakukan evakuasi barang berharga sehingga dapat mengurangi resiko yang timbul

sebagai akibat dari kejadian bencana tersebut, seperti barang rusak dan hilang. Selain itu, memilikinya akses khusus dalam melakukan pengajuan permohonan bantuan kebencanaan memberikan hasil/keuntungan dan manfaat untuk diprioritaskan sehingga penanganan yang dilakukan cepat dan tidak mengulur waktu lama.

b. Sumberdaya

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat menilai tingkat *appropriateness*/ketepatangunaan dari sumberdaya yang tersedia dinilai **cukup baik**, yaitu sebanyak 49 responden atau sebesar 52% dari keseluruhan responden karena dengan banyaknya bantuan yang datang telah dirasakan cukup memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada masyarakat.

c. Disposisi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *appropriateness*/ketepatangunaan dari disposisi khususnya perihal pengangkatan personil yang dilakukan dinilai **cukup baik**, yakni sebanyak 55 responden atau sebesar 58% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti, masyarakat menilai pengangkatan personil yang telah dilakukan cukup memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada masyarakat karena banyaknya bantuan yang ada di lokasi menyebabkan penanganan bencana saat tanggap darurat cepat diatasi.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 95 responden di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP), mayoritas masyarakat di kawasan PGP menilai tingkat *appropriateness*/ketepatangunaan dari struktur birokrasi khususnya perihal penyebaran tanggungjawab yang dilakukan dinilai **cukup baik**, yaitu sebanyak 44 responden atau sebesar 46% dari keseluruhan responden karena banyaknya bantuan yang datang dirasakan masyarakat telah cukup memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana.

2.5 Faktor-faktor yang dihadapi

Leo Agustino (2014: 45-46) mengatakan bahwa kebijakan publik pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan publik memiliki hubungan yang saling berpengaruh. Terdapat beberapa bentuk lingkungan yang dapat mempengaruhi kegiatan kebijakan publik, diantaranya variabel politik dan sosial ekonomi yang disebut-sebut sebagai dua variabel penting pertama untuk dibahas dalam memahami pengaruhnya terhadap kebijakan yang tercipta. Berikut merupakan hasil temuan di lapangan terkait hubungan antara lingkungan kebijakan (politik dan sosial ekonomi) dengan kegiatan kebijakan yang menjadi faktor pendorong maupun penghambat Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi bencana banjir di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) pada awal tahun 2013-2014.

a. Kondisi Politik

Miriam Budiardjo (2008: 15) mengatakan politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis. Oleh karena itu terkait kondisi politik, peneliti menemukan beberapa hal apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi penanggulangan bencana banjir khususnya di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) pada awal tahun 2013-2014, diantaranya:

a.1 Faktor Pendorong

1. Kejadian bencana banjir di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP) yang ditetapkan sebagai status nasional siaga bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) menyebabkan penanganan bencana yang dilakukan mendapat respon yang baik dan akses khusus langsung kepada walikota. Sehingga penanganan bencana khususnya pada tanggap darurat banyak mendapat bantuan yang datang dari berbagai kalangan dan tentu saja tidak hanya dari dalam Kota Bekasi. Begitu pun pada kejadian bencana di awal tahun 2013 yang bertepatan dengan adanya Pilkada Jabar sehingga respon yang di dapat lebih baik dirasakan masyarakat daripada kejadian yang terjadi di awal tahun 2014.

a.2 Faktor Penghambat

1. Perbaikan tanggul yang telah dilakukan pemerintah belum dibangun secara permanen sehingga upaya perbaikan tanggul terkesan masih tambal sulam, seperti tanggul yang kembali rusak, baik berupa jebol, retakan, ataupun limpasan ketika air datang. Begitu pun dengan upaya peninggian tanggul yang dimaksudkan agar tidak terjadi lagi limpasan malah menyebabkan kedalaman air yang masuk ke kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) dirasakan masyarakat semakin tinggi karena peninggian tanggul tersebut tidak diiringi oleh pengerukan sungai yang sudah lama tidak dilakukan.
2. Status sungai yang wewenangnya juga dimiliki oleh Pemerintah Pusat sehingga upaya penanggulangan bencana banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi sebatas pada saat bencana banjir saja.
3. Belum memilikinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SOPs (*Standar Operating Procedures*), dan peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana di Kota Bekasi menyebabkan penyebaran tanggungjawab yang diberikan pemerintah kepada SKPD dan *stakeholder* dalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) menimbulkan ketidakjelasan dan kesalahpahaman karena disamping tidak memiliki lembaga yang dapat dijadikan panutan atau *power*, para personil pun mengalami kesulitan karena tidak memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Ketiadaan BPBD, SOPs, dan peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana juga menyulitkan dalam melakukan koordinasi karena penanganan bencana yang dilakukan kurang terfokus.
4. Belum memilikinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menyebabkan sulitnya pemerintah di dalam menetapkan status tanggap darurat. Begitu pun dengan pengangkatan personil yang dilakukan dibentuk hanya pada saat mendekati waktu bencana datang. Selain itu, pengangkatan personil yang didapatkan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pun kurang memiliki kompetensi dalam bidang kebencanaan sehingga masih perlu dilakukan pelatihan secara berkesinambungan untuk dapat terjun di lapangan.
5. Kampung Siaga Bencana (KSB) yang didirikan pada Mei 2014 kurang mendapat dukungan dari pemerintah karena hanya sebatas didirikan saja, tidak adanya

pelatihan dan instruksi yang dilakukan secara berkesinambungan. Begitu pun dengan minimnya sarana dan prasarana yang diberikan.

b. Kondisi Sosial Ekonomi

Leo Agustino (2014: 56) mengatakan bahwa kondisi sosial ekonomi dipakai karena tidak mungkin memisahkan faktor sosial dan ekonomi dengan kebijakan publik. Tingkat masyarakat dalam perkembangan ekonomi akan menentukan batas apa yang dapat dikerjakan pemerintah dalam menyediakan barang-barang dan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut ditemukan apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam menanggulangi bencana banjir khususnya pada kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) di awal tahun 2013-2014 terkait kondisi sosial ekonomi yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi, diantaranya:

b.1 Faktor Pendorong

1. Terdapat peran dari masyarakat sekitar dalam upaya penanggulangan bencana melalui kesadaran terhadap bahaya bencana banjir dengan membuat organisasi masyarakat yang dinamakan dengan Kompi 887. Organisasi masyarakat ini mendapat bantuan berupa sarana dan prasarana yang berasal swasta berupa pendirian posko dan peralatan evakuasi. Berdirinya Kompi 887 memberikan masyarakat informasi mengenai status ketinggian sehingga masyarakat dapat segera melakukan persiapan dalam menghadapi bencana banjir. Selain itu, pernah dilakukannya swadaya pada tahun 2013 oleh masyarakat untuk menambal bagian tanggul yang retak dan bocor.
2. Kali Bekasi yang juga wewenangnya dimiliki oleh pemerintah pusat, maka penanganan bencana tidak hanya dibebankan kepada APBD melainkan juga kepada APBN terkait perbaikan tanggul yang dilakukan secara permanen. Sayangnya, kurang adanya transparansi mengenai mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan dan pihak atau pengembang darimana yang diberikan wewenang untuk melakukan perbaikan tanggul tersebut.

b.2 Faktor Penghambat

1. Masih sulitnya menggerakkan masyarakat untuk dapat bergabung menjadi relawan Kampung Siaga Bencana (KSB) di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP).
2. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk mengatasi seluruh kejadian bencana di Kota Bekasi menyebabkan upaya untuk menanggulangi kejadian

bencana menjadi terbatas, seperti masih terbatasnya pengadaan fasilitas (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana di Kota Bekasi.

III. PENUTUP

Bagian penutup dalam pembahasan penelitian yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi awal tahun 2013-2014. Berikut dipaparkan, yakni:

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab sebelumnya dan juga didasarkan atas tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

3.1.1 Implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam penanggulangan bencana banjir di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP) periode 2013-2014

Komunikasi dalam penanggulangan bencana di Kota Bekasi dikomandoi oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) dikarenakan pada saat itu di Kota Bekasi belum memiliki lembaga yang secara khusus menangani tentang kebencanaan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana hingga kini masih belum ada di Kota Bekasi. Oleh karenanya, pemerintah daerah masih berpedoman kepada peraturan yang berasal dari pusat dan provinsi.

Sumberdaya yang tersedia saat belum memilikinya BPBD pada saat itu, penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) dengan melibatkan beberapa SKPD dan *stakeholder*, diantaranya yang memiliki peran penting dalam menangani kejadian bencana banjir di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP) yaitu Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta), Taruna Siaga Bencana (Tagana), pemerintah setempat Kelurahan dan Kecamatan. Selain itu, terdapat juga organisasi masyarakat yaitu Kompi 887 yang didirikan pada tahun 2009.

Disposisi atau sikap yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir yang terjadi di kawasan perumahan

Pondok Gede Permai (PGP) pada awal tahun 2013-2014 yang pada saat itu di Kota Bekasi belum memiliki BPBD, maka pengangkatan personil yang dilakukan melalui pengajuan atau usulan yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai dengan posisi yang dibutuhkan dan juga kriteria-kriteria yang diharapkan khususnya yang memiliki kompetensi dalam bidang kebencanaan. Hal ini dikarenakan SKPD atau *stakeholder* yang termasuk dalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) tersebut tidak memiliki wewenang terhadap perekrutan pegawai baru. Terkait insentif, belum adanya insentif khusus yang diberikan dalam penanggulangan bencana baru hanya sebatas tunda dan gaji. Namun untuk relawan yakni Taruna Siaga Bencana (Tagana), insentif yang diberikan langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Struktur birokrasi yang juga pada saat itu belum memilikinya BPBD di Kota Bekasi dan juga peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana hingga kini. Begitu pun dengan belum adanya SOPs tentang penanggulangan bencana di Kota Bekasi pada saat itu, maka penanganan bencana hanya berpedoman dari peraturan pada tingkat provinsi, pusat, dan juga SOPs pada masing-masing SKPD dan *stakeholder* terkait. Selain itu dalam penanggulangan bencana sebelum adanya BPBD di Kota Bekasi, pemerintah daerah melakukan penyebaran tanggungjawab melalui beberapa SKPD dan *stakeholder* yang masuk ke dalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB), seperti pada Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi yang memiliki tanggungjawab terkait penganggulangan bencana banjir yaitu pada bidang Tata Air, Dinas Sosial ditanggungjawabkan pada bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seksi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dan dibantu oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) selaku relawan berbasis masyarakat yang berada dalam naungan Dinas Sosial. Terkait koordinasi, tidak ada pertemuan yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana di Kota Bekasi. Koordinasi yang dilakukan khusus untuk penanggulangan bencana diadakan hanya pada saat terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).

3.1.2 Evaluasi dari implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam penanggulangan bencana banjir di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP) periode 2013-2014

Evaluasi dari implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi pada kejadian bencana banjir di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP) periode 2013-2014 dinilai mayoritas masyarakat adalah cukup berhasil dengan nilai rata-rata sebesar 54% dari keseluruhan responden yang dijabarkan berdasarkan kriteria evaluasi William Dunn berikut ini:

1. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi dari implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi memperoleh penilaian mayoritas dari masyarakat cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 50% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti berbagai usaha dari implementasi yang dilakukan telah cukup sebanding dengan hasil yang diterima oleh masyarakat.
2. Tingkat *Adequacy*/Ketepatan dalam menjawab masalah dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi memperoleh penilaian mayoritas dari masyarakat cukup baik dengan nilai rata-rata 60% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti implementasi kebijakan yang dilakukan telah cukup tepat dalam memecahkan masalah.
3. Tingkat *equity*/pemerataan dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi memperoleh penilaian mayoritas dari masyarakat cukup baik dengan nilai rata-rata 60% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti implementasi kebijakan yang telah dilakukan manfaatnya telah didistribusikan cukup merata kepada masyarakat.
4. Tingkat responsivitas dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dinilai mayoritas masyarakat adalah cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 53% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti, masyarakat menilai bahwa implementasi kebijakan yang telah dilakukan dalam penanggulangan bencana banjir di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) dinilai cukup dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, dan keinginan dari masyarakat.
5. Tingkat *appropriateness*/ketepatan dari implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dinilai

mayoritas masyarakat adalah cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 53% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti masyarakat menilai implementasi kebijakan yang telah dilakukan cukup dapat memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada masyarakat.

3.1.3 Faktor-faktor yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi dalam penanggulangan bencana banjir di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP) periode 2013-2014

1. Faktor Pendorong

- a. Kondisi Politik, dengan ditetapkannya bencana banjir di kawasan PGP sebagai status nasional siaga bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) memperoleh khusus oleh walikota sehingga pemerintah merespon dengan baik kejadian bencana tersebut khususnya pada tanggap darurat. Begitu pun dengan bantuan yang datang tidak hanya dari luar Kota Bekasi, baik berupa personil, sarana-prasarana, dan bantuan logistik.
- b. Kondisi Sosial Ekonomi, terdapatnya peran serta masyarakat yang peduli terhadap banjir dengan membentuk organisasi masyarakat yang dinamakan dengan Kompi 887 dan juga pernah melakukan swadaya pada tahun 2013 untuk memperbaiki tanggul yang bocor dan retak. Selain itu, Kali Bekasi yang juga wewenangnya milik pemerintah pusat, maka penanganan bencana yang dilakukan terkait perbaikan tanggul tidak hanya dibebankan kepada APBD tetapi juga APBN.

2. Faktor Penghambat

- a. Kondisi Politik, perbaikan tanggul yang dilakukan masih tambal sulam dan tidak diiringi dengan adanya pengerukan sedimentasi sehingga walaupun tanggul ditinggikan masih terjadinya limpasan air dan juga tanggul yang kembali rusak. Status sungai yang juga milik pemerintah pusat menyebabkan peran pemerintah daerah hanya sebatas saat terjadinya bencana. Belum memilikinya BPBD, SOPs dan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam upaya penanggulangan bencana yang dilakukan. Pengangkatan personil yang dilakukan pun kurang memiliki kompetensi dalam bidang kebencanaan dan hanya dibentuk saat menjelang bencana. Kampung Siaga Bencana (KSB) di kawasan

perumahan Pondok Gede Permai (PGP) hanya sebatas dibentuk dan tidak adanya keberlanjutan.

- b. Kondisi Sosial Ekonomi, masih sulitnya menggerakkan masyarakat untuk dapat bergabung menjadi relawan dan masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana di Kota Bekasi menyebabkan terbatasnya juga pengadaan fasilitas (sarana dan prasarana) untuk penanggulangan bencana banjir.

3.2 Saran

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang dapat memberikan saran kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi bencana banjir khususnya di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) agar penanganan yang dilakukan bisa lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, saran ini juga ditujukan kepada Pemerintah Pusat yang juga memiliki wewenang terkait Kali Bekasi. Begitu pun dengan Pemerintah Kabupaten Bogor selaku daerah yang memiliki bagian hulu dari sungai yang melintasi kawasan perumahan Pondok Gede Permai. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Pusat

- a. Pemerintah pusat lebih peduli terhadap kejadian bencana banjir yang sering terjadi di kawasan perumahan PGP sebagai akibat dari rusaknya tanggul dan juga limpasan dengan melakukan upaya perbaikan tanggul permanen, melakukan normalisasi sungai, dan pengerukan sungai secara berkala.
- b. Perbaikan tanggul diperlu adanya transparansi mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan dan juga berasal darimana pemborong yang diberikan wewenang untuk mengerjakan. Sehingga pengawasan juga dapat dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat sekitar.
- c. Baru berdirinya BPBD di Kota Bekasi pada awal tahun 2015, diharapkan BNPB dapat memberikan pelatihan secara berkesinambungan sehingga para personil yang ada di Kota Bekasi bisa lebih memiliki kompetensi dan penanggulangan bencana yang dilakukan bisa lebih baik dan tepat sasaran.
- d. Pemerintah pusat menjadi wadah antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bogor agar dapat berkerja bersama-sama untuk dapat mengatasi

permasalahan penggundulan hutan di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selaku bagian hulu dari Kali Bekasi.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Bogor

- a. Bisa lebih meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bekasi agar penanganan bencana tidak hanya dilakukan oleh wilayah hilir. Namun juga bagian hulu yang memiliki peran penting agar air yang mengalir ke bagian hilir debit airnya dapat diminimalisir.
- b. Lebih tegas untuk mengatasi persoalan penggundulan hutan yang terjadi di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sehingga tidak terjadi lagi perubahan fisik di wilayah DAS selaku wilayah tangkapan air hujan yang akan mengalir ke sungai yang bersangkutan. Dengan demikian, retensi DAS bisa lebih baik karena air hujan dapat diresap (diretensi) dibagian hulu dan secara perlahan-lahan dialirkan ke sungai hingga tidak menimbulkan banjir dibagian hilir.

3. Untuk Pemerintah Kota Bekasi

- a. Pemerintah Kota Bekasi lebih giat meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Pusat perihal penggundulan hutan yang terjadi dibagian hulu sungai agar dapat dicegah sehingga debit air yang dilepaskan dibagian hilir bisa ditekan dan resiko bencana banjir bisa lebih diminimalisir dampaknya.
- b. Kesalahan pembangunan dan tata guna lahan yang terjadi di perumahan Pondok Gede Permai (PGP) dapat dijadikan pembelajaran bagi pemerintah agar tidak terjadi kesalahan yang serupa. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengawasan yang ketat dan pemantauan secara berkesinambungan agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini tentu demi berlangsungnya konsistensi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat.
- c. Pemerintah daerah perlu untuk lebih memberdayakan dan mensejahterahkan organisasi masyarakat yaitu Kompi 887 yang memiliki peran andil di dalam memberikan keakuratan informasi mengenai status air dari hulu hingga hilir sehingga masyarakat dapat lebih waspada dalam menghadapi bencana yang datang. Tentunya hal ini dapat mengurangi dampak dari kejadian bencana yang terjadi.
- d. Berdasarkan misi kelima RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 untuk segera ditegakkannya Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana agar tidak terjadi lagi

kesalahpahaman bagi personil dalam melakukan penanggulangan bencana karena telah memiliki pedoman dan peraturan yang jelas.

- e. Diharapkan dengan adanya BPBD dan SOPs tentang penanggulangan bencana di awal tahun 2015 penanganan tentang kebencanaan khususnya bencana banjir bisa lebih terfokus sehingga pemerintah dapat lebih peduli dan tentunya tidak hanya merespon kejadian tersebut hanya pada saat bencana itu terjadi. Begitu pun dengan penyebaran tanggungjawab yang dilakukan agar tidak ada lagi terjadinya tumpang tindih dalam melakukan koordinasi sehingga koordinasi yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan yang tidak hanya membahas mengenai kejadian bencana pada saat bencana itu datang.
- f. Selain itu, dengan adanya BPBD juga diharapkan tidak hanya dapat menambah jumlah personil melainkan juga kualitasnya sehingga personil yang ada memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang kebencanaan. Begitu pun dengan pengadaan fasilitas sarana-prasarana penanggulangan bencana di Kota Bekasi yang perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya agar pemerintah daerah tidak terlalu mengandalkan bantuan yang datang dari luar Kota Bekasi. Perlunya ketersediaan yang tepat dari personil dan sarana-prasarana penanggulangan bencana ini pun dikarenakan jumlah titik banjir yang ada di Kota Bekasi sudah tersebar di hampir seluruh kecamatan yang ada. Selain itu, dalam pengangkatan personil yang dilakukan ketika telah memiliki BPBD di Kota Bekasi diharapkan bisa lebih berdedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan lebih khususnya untuk kepentingan masyarakat.
- g. Anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana di Kota Bekasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah agar tidak menjadi penghalang dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang baik untuk masyarakat. Selain itu, lebih baik pemerintah menganggarkan dengan jelas dan transparan mengenai alokasi yang diberikan untuk penanggulangan bencana dimulai dari pra bencana, saat bencana, dan paska bencana. Jangan hanya mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana untuk tanggap darurat saja walaupun pemerintah sebenarnya memiliki hak untuk mengajukan anggaran tanggap darurat melalui anggaran tidak terduga atau memakai dana cadangan daerah. Tentunya dengan adanya kejelasan dan transparansi

perihal anggaran tersebut pemerintah telah berdedikasi untuk memberikan dukungan dan kepeduliannya terhadap kejadian bencana yang terjadi.

- h. Didirikannya Kampung Siaga Bencana (KSB) pada masing-masing kawasan yang rawan terjadinya bencana khususnya KSB di kawasan perumahan Pondok Gede Permai (PGP) perlu ditingkatkan lagi dukungannya oleh pemerintah, seperti dengan penyediaan gardu sosial yang layak, lumbung sosial yang perlu ditingkatkan mengenai ketersediaan fasilitas penanggulangan bencana, dan juga masih diperlukannya bimbingan dan pelatihan serta pemantauan yang dilakukan secara berkesinambungan.
- i. Kejadian bencana banjir yang kembali terjadi di kawasan PGP pada tahun 2016 benar-benar perlu adanya keseriusan dari pemerintah, baik daerah maupun pusat dengan melakukan pembangunan tanggul secara permanen yang menyeluruh, dan juga diperlukan adanya jalan inspeksi agar dapat mempermudah di dalam melakukan normalisasi sungai. Masyarakat sebetulnya setuju apabila pemerintah melakukan relokasi asalkan dengan kompensasi yang sesuai dan wacana tentang relokasi ini sudah lama terdegar oleh masyarakat meskipun hingga kini belum terealisasi.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kodoatie, Robert J dan Roestam Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: ANDI.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran Edward*. Yogyakarta: Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Jurnal

- Anonimus. (tt) *Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia Deputi Bidang Sarana dan Prasarana*. Jakarta: Direktorat Pengairan dan Irigasi. Dalam [:http://www.bappenas.go.id/files/5913/4986/1931/2kebijakan-penanggulangan-banjir-di-indonesia_20081123002641_1.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/5913/4986/1931/2kebijakan-penanggulangan-banjir-di-indonesia_20081123002641_1.pdf) diunduh pada hari Jum'at, 7 November 2014 pukul 18.44 WIB

Skripsi

- Nita Sri Ahaliati. (2013). *Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi Masyarakat Pasca Banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Situs Internet

- <http://www.antaranews.com/berita/354293/pemkot-bekasi-dinilai-tidak-siap-hadapi-banjir> diakses pada hari Jum'at, 6 November 2015 pukul 14.42 WIB
- <http://www.beritasatu.com/megapolitan/190903-pu-alokasikan-rp-25-m-untuk-proyek-lanjutan-tanggul-kali-bekasi.html> diakses pada hari Senin, 21 Maret 2016 pukul 17.04 WIB
- <http://www.antaranews.com/berita/403758/perbaikan-tanggul-kali-bekasi-habiskan-rp39-miliar> diakses pada hari Senin, 21 Maret 2016 pukul 16.44 WIB

<http://m.news.viva.co.id/news/read/474773-indonesia-darurat-bencana-butuh-solusi-cepat> diakses pada hari Rabu, 16 Desember 2015 pukul 20.41 WIB

www.beritabekasi.co/proses.php?id=1842 diakses pada hari Rabu, 16 Desember 2015 pukul 16.41 WIB

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/91/18mgtqey-ratusan-korban-banjir-jati-asih-dievakuasi> diakses pada hari Kamis, 16 Desember 2015 pukul 12.52 WIB

<http://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/01/18/mgtqey-ratusan-korban-banjir-jati-asih-dievakuasi> diakses pada hari Kamis, 16 Desember 2015 pukul 12.52 WIB

<http://www.beritasatu.com/megapolitan/225123-dinsos-kota-bekasi-gelar-kesiapan-personel-siaga-banjir.html> diakses pada hari Minggu, 20 Desember 2015 pukul 16.21 WIB

<http://infopublik.id/read/40995/gubernur-jawa-barat-kunjungi-korban-banjir-pondok-gede-permai.html> diakses pada hari Kamis, 10 Desember 2015 pukul 14.48 WIB

<http://kompi887.blogspot.co.id/> diakses pada hari Kamis, 7 Januari 2016 pukul 19.34 WIB

<http://www.bnpp.go.id/page/read/5/definisi-dan-jenis-bencana> dilihat pada 26 Mei 2013 pukul 21.44 WIB

<http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/02/22/083556645/1200-Rumah-di-Jatiasih-Terendam-Banjir-3-Meter> diakses pada hari Sabtu, 9 Januari 2016 pukul 16.12 WIB

<http://news.liputan6.com/read/834471/bekasi-banjir-lagi-walikota-rahmat-effendi-minta-maaf> diakses pada hari Minggu, 9 November 2014 pukul 20.11 WIB

<http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/083556812/Banjir-Kali-Bekasi-Terparah-Tahun-ini> diakses pada hari Rabu, 29 Oktober 2014 pukul 22.06 WIB

<http://news.liputan6.com/read/834365/kali-cikeas-meluap-rumah-di-pondok-gede-terendam-hingga-4-meter> diakses pada hari Minggu, 9 November 2014 pukul 20.11 WIB

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/02/05/mhqoml-bnpb-penyebab-banjir-pondok-gede-tanggul-cikeas-jebol> diakses pada hari Rabu, 29 Oktober 2014 pukul 21.32 WIB

<http://sp.beritasatu.com/home/banjir-pondok-gede-permai-bekasi-telah-surut/29285> diakses pada hari Jum'at, 7 November 2014 pukul 18.19 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_Jakarta_2013 diakses pada hari Minggu, 3 Januari 2016 pukul 16.41 WIB

<http://bekasiraya.com/detail.php?id=4255#.UYyH4aI2Iz5> dilihat pada hari Jum'at, 10 Mei 2013 pukul 12.48 WIB

<http://nationalgeographic.co.id/forum/topic-1497.html> diakses pada hari Jum'at, 7 November 2014 pukul 17.06 WIB

http://ms.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia diakses pada hari Rabu, 15 Januari 2014 pukul 17.27 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Nurul Furqon selaku Kepala Bidang Tata Air pada hari Rabu, 16 Juli 2014 di Kantor Bidang Tata Air Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi

Wawancara dengan Suroyo selaku Staff Bidang Tata Air pada hari Rabu, 13 Agustus 2014 di Kantor Bidang Tata Air Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi

Wawancara dengan Priadi Santoso selaku Kepala Bidang Kepegawaian pada hari Kamis, 23 Oktober 2014 di Kantor Bidang Kepegawaian Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi

Wawancara dengan Slamet Haryono selaku Kasi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Dinas Sosial) pada hari Senin, 12 Januari 2015

Wawancara dengan Engkus Kustara selaku Ketua Tagana Kota Bekasi periode 2006-2014 pada hari Selasa, 23 September 2014

Wawancara dengan Sarto Effendy selaku perwakilan dari Kecamatan Jatiasih pada hari Kamis, 5 Maret 2015

Wawancara dengan Tayonih selaku perwakilan dari Kelurahan Jatirasa pada hari Rabu, 21 Januari 2015

Wawancara dengan Abdul Muis selaku Wakil Dekan/Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi pada hari Rabu, 25 Februari 2015

Wawancara dengan Tengku Imam Kobul selaku Direktur Sosial dan Pendidikan Lembaga Swadaya Masyarakat Satuan Pemuda Lingkar Demokrasi (LSM Sapulidi) pada hari Rabu, 25 Februari 2015

Wawancara dengan Suyono selaku Ketua RW 08 pada hari Rabu, 21 Januari 2015

Wawancara dengan Bambang selaku Sekretaris RW sekaligus Ketua KSB PGP pada hari Rabu, 21 Januari 2015

Wawancara dengan Amad Amin selaku Ketua RW 09 pada hari Senin, 23 Maret 2015

Wawancara dengan Bambang Kesot selaku Ketua RW 010 pada hari Senin, 23 Maret 2015